



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah**



RENCANA STRATEGIS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2020 - 2024



RENCANA STRATEGIS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, hasil evaluasi Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019 serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 ini memuat tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan Kementerian Agama selaras dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai Sasaran Kegiatan yang selaras dengan sasaran kegiatan pada Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode lima tahun ke depan.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang agama dan pendidikan tahun 2024.

Palu, 28 Agustus 2020
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 565 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden serta Prioritas Nasional;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

24

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman bagi satuan kerja untuk:

1. penyusunan Rencana Strategis;
2. penyusunan Rencana Kerja Tahunan; dan
3. penyusunan Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



RUSMAN LANGKE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 565 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	lx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	3
1.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	4
1.1.3 Penngukuhan Suasana Kerukunan Hidup Beragama yang Harmonis	7
1.1.3.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	12
1.1.4 Pemenuhan Kebutuhan akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	14
1.1.4.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	14
1.1.4.2 Penyuluh Agama yang Kompeten	15
1.1.4.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	18
1.1.4.4 Penghulu yang Kompeten	20
1.1.4.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	21
1.1.5 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	24
1.1.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	26
1.1.6.1 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	26
1.1.6.2 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	27
1.1.7 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	29
1.1.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	32
1.2 Potensi dan Permasalahan	34
1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	34
1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	34

1.2.3	Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	36
1.2.4	Pengukuhan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	38
1.2.5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	39
1.2.6	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	40
1.2.7	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	41
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		43
2.1	Visi Kementerian Agama	43
2.2	Misi Kementerian Agama	45
2.3	Tujuan Kementerian Agama	47
2.4	Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	47
2.5	Nilai-nilai Kementerian Agama	62
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
3.1	Target Kinerja	66
3.2	Kerangka Pendanaan	69
PENUTUP		74
LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan 5 Program		
LAMPIRAN II Matriks Kinerja dan Pendanaan 12 Program		
LAMPIRAN III Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penyuluh Agama dan Rasio menurut Agama di Sulawesi Tengah	4
Gambar 2	Dokumentasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	5
Gambar 3	Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019	9
Gambar 4	Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	12
Gambar 5	Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	15
Gambar 6	Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019	25
Gambar 7	Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	31
Gambar 8	Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Tahun 2015-2019	31
Gambar 9	Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	31
Gambar 10	Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAK Tahun 2015-2019	31
Gambar 11	Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019	31
Gambar 12	Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019	31
Gambar 13	Grafik APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	31
Gambar 14	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK Tahun 2015-2019	33
Gambar 15	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMAK Tahun 2015-2019	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019	5
Tabel 2	Jumlah PPIU di Sulawesi Tengah yang Ditetapkan Izin Operasional Tahun 2016-2019	24
Tabel 3	Hasil Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019	27
Tabel 4	Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga, dan Jumlah Peserta Didik Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	30
Tabel 5	Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/Masalah Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan antar Umat Beragama	35
Tabel 6	Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/Masalah Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	37
Tabel 7	Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/Masalah Penguatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	38
Tabel 8	Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/Masalah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	39
Tabel 9	Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/Masalah Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	40
Tabel 10	Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/Masalah Mutu Agama dan Keagamaan	41
Tabel 11	Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	70
Tabel 12	Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024	72

DAFTAR SINGKATAN

ASN	Aparatur Sipil Negara
ATS	Anak Tidak Sekolah
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
BMN	Barang Milik Negara
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPIH	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPS	Bank Penerima Setoran
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Dikdas	Pendidikan Dasar
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kepmen	Keputusan Menteri
KKG	Kelompok Kerja Guru
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
LEMSAKTI	Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MoU	Memorandum of Understanding
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MTQ	Musabaqah Tilawatil Qur'an
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRG	Nomor Registrasi Guru
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PESPARANI	Pesta Paduan Suara Gerejani
PESPARAWI	Pesta Paduan Suara Gerejawi

PHU	Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PIP	Program Indonesia Pintar
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPIU	Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
RRI	Radio Republik Indonesia
Renstra	Rencana Strategis
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
SAPA	Sarapan BersamaPenyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SISKOHAT	Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
SK	Surat Keputusan
SLTA	Sekolah Lanjutan Tinglat Atas
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SS	Sasaran Strategis
STQ	Seleksi Tilawatil Qur'an
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	Taman Kanak-Kanak
TVRI	Televisi Republik Indonesia
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
ZI	Zona Integritas
3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama periode 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Tengah yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun 7 (tujuh) misi yang mendukungnya, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sarasannya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

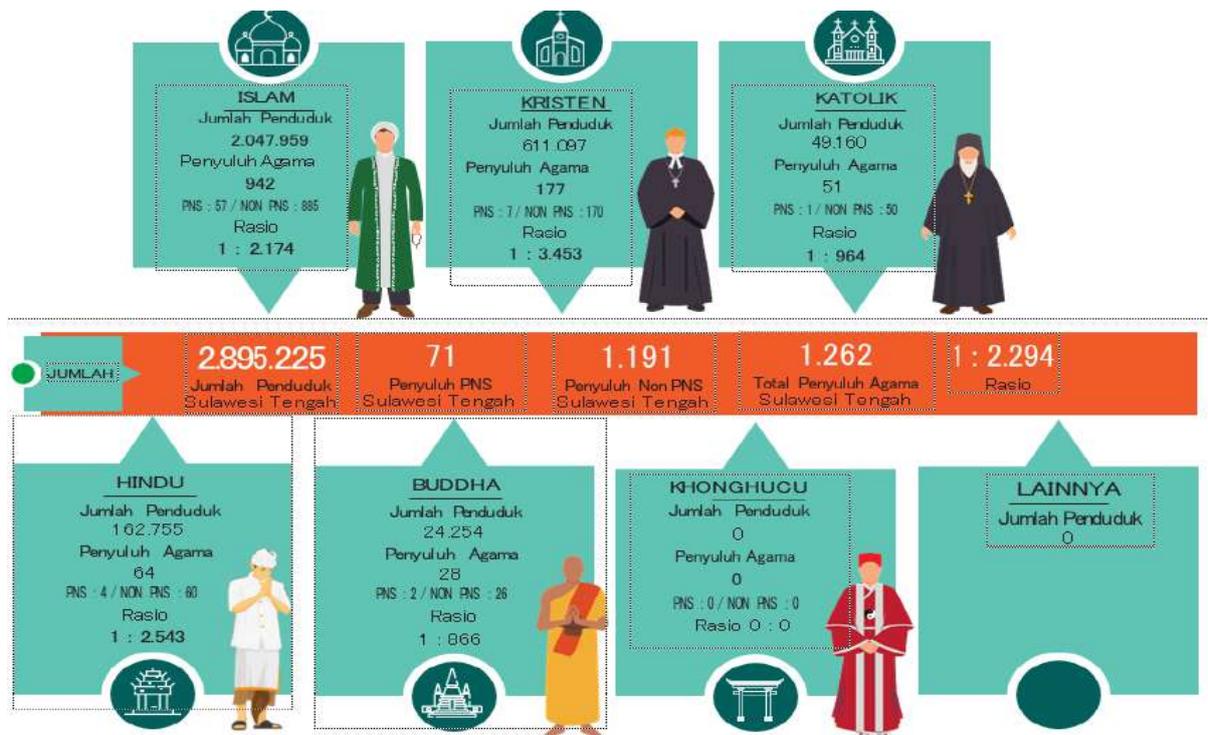
1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Adapun capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator : 1) meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan 2) meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan. Rasio penyuluh dibandingkan jumlah umat beragama di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penyuluh Agama dan Rasio menurut Agama di Sulawesi Tengah

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada gambar di atas di mana 1 orang penyuluh agama harus melayani 2.294 umat beragama secara rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk didalamnya para pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPARANI, Utsawa Dharma Gita, Swayamwara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma.

Di samping itu, berbagai peringatan Hari Besar Keagamaan pada Tingkat Provinsi dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan, bekerja sama dengan lembaga seni dan pemerintah provinsi/daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015-2019

No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Bimas Islam	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	2 kali	2016 (Kab. Parigi Moutong) 2018 (Kab. Morowali)
		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	3 kali	2015 (Kab. Buol) 2017 (Kab. Donggala) 2019 (Kab. Morowali Utara)
2	Bimas Kristen	Pesparawi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	1 kali	2017 (Palu)
		Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)	1 kali	2018 (Poso)
		Kelahiran Yesus Kristus (Natal)	3 kali	2017 - 2019 (Palu)
		Pesparawi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	1 kali	2017 (Palu)
3	Bimas Hindu	Utsawa Dharma Gita	1 kali	2016 (Palu)
		Festival Seni Keagamaan Hindu	1 kali	2019 (Palu)
		Hari Besar Hindu Tingkat Provinsi (Hari Raya Nyepi Tawur Agung)	5 kali	2015 - 2019 (Pura Agung Wana Kerta Jagatnatha Palu)
4	Bimas Buddha	Sippa Dhamma Samajja	1 kali	2018 (Palu)

Sumber Data : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2020



MTQ Tk. Provinsi Sulteng ke-XXVII di Morowali Tahun 2018
2017



Pesparawi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun



Upacara & Sembahyang Hari Raya Nyepi di Pura Agung Wana
Kertha Jagatnatha Palu Tahun 2019



Sippa Dhamma Samajja Tk Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
Tahun 2018

Gambar 2
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah

1.1.3 Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa: (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) provinsi; dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei yang dilakukan Litbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi, (2) kesetaraan, (3) kerjasama. Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variable-variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal. Capaian Indeks KUB Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

2019

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI



Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Untuk memperoleh Indeks tersebut, terdapat tiga dimensi yang diukur yaitu: toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama. Survei oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini dilaksanakan pada 16 - 19 Mei dan 18 - 24 Juni tahun 2019.

36 Peneliti

1.360 Enumerator

13.600 Responden

136 Kabupaten/Kota

34 Provinsi

INDEKS KUB
2019
73,83
(Rukun Tinggi)

Metode Penarikan Sampel
pengambilan sampel secara acak berjenjang (multistage clustered random sampling)

Margin of error (MoE)
±4,8% dengan tingkat kepercayaan 95%

Quality Control
monitoring & pendampingan saat wawancara dan spot check pasca wawancara pada 20% dari total sampel

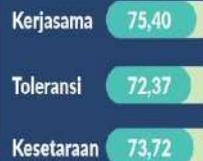
Teknik Analisis Data
data penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial



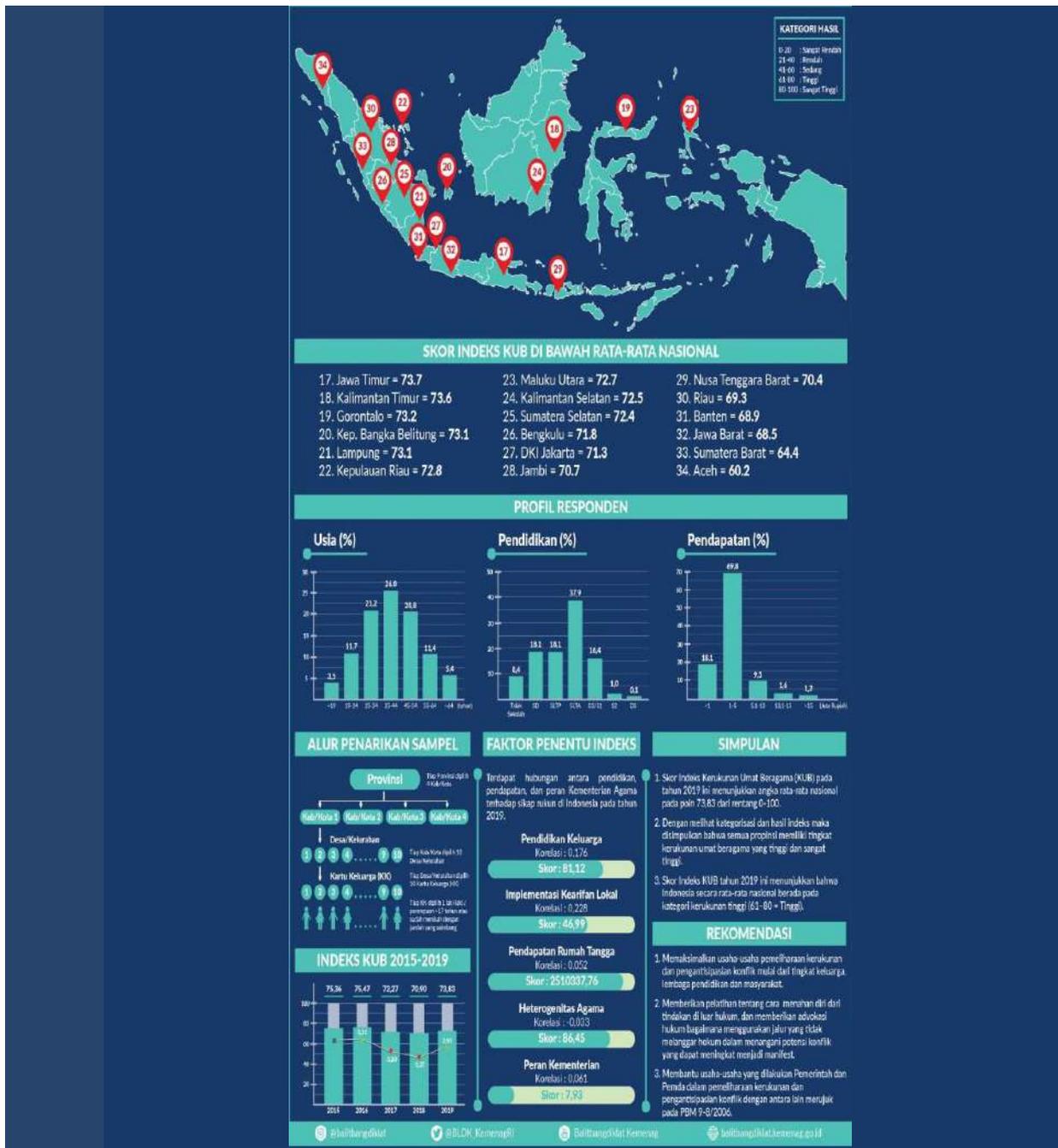
SKOR INDEKS KUB DI ATAS RATA-RATA NASIONAL

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Papua Barat = 82.1 | 9. Kalimantan Barat = 76.7 |
| 2. Nusa Tenggara Timur = 81.1 | 10. Sumatera Utara = 76.3 |
| 3. Bali = 80.1 | 11. Sulawesi Selatan = 75.7 |
| 4. Sulawesi Utara = 79.9 | 12. Sulawesi Tengah = 75.0 |
| 5. Maluku = 79.4 | 13. Jawa Tengah = 74.6 |
| 6. Papua = 79.0 | 14. DI Yogyakarta = 74.2 |
| 7. Kalimantan Utara = 78.0 | 15. Sulawesi Barat = 74.1 |
| 8. Kalimantan Tengah = 77.8 | 16. Sulawesi Tenggara = 73.9 |

DIMENSI KUB 2019



© Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama



Sumber: Baliitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2020

Gambar 3
Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Tengah berada pada kategori tinggi, di atas rata-rata nasional yaitu 75. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah berjalan dinamis. Namun walaupun indeks capaiannya sudah tinggi, tetapi masih perlu diwujudkan program kerukunan umat beragama sampai pada tingkat daerah (pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota), bahkan jika

memungkinkan dilaksanakan setingkat Kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang memperhitungkan faktor-faktor non keagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerja sama di tengah masyarakat yang majemuk.

Peran serta seluruh komponen masyarakat juga sangat diperlukan, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, dan terutama adalah peran pemerintah. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah dan akan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, serta mengembangkan budaya damai dan toleransi. Kegiatan penguatan kerukunan berupa: 1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; 2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; 3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; 4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan 5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah juga telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut 'aktor', karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, *workshop*, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti: 1) pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama, 2) peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, 3) pelatihan promosi kerukunan umat beragama, dan 4) penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Pelibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait kerukunan umat beragama. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam membingkai kerukunan antar umat beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.

Kegiatan yang dilakukan berupa *workshop* dan dialog, yang telah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah melalui berbagai kegiatan sepanjang tahun 2015-2019. Tahun 2016-2019 telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Hidup Rukun Tingkat SLTA/MA guna memberikan pemahaman tentang kerukunan beragama dan pendidikan multikultural, multi etnik, dan multibudaya sejak dini kepada para pelajar dalam rangka menciptakan hidup rukun dan damai di lingkup sekolah. Selain itu pada tahun 2017 dan 2019, telah dilaksanakan pula kegiatan Pembinaan Aktor-Aktor KUB dalam rangka penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan, dan kegiatan Dialog Lintas Agama dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya sepanjang tahun 2015-2019 di tingkat kabupaten/kota sebagai forum diskusi bersama untuk memikirkan, merenungkan dan mendiskusikan mengenai permasalahan, kendala maupun hambatan yang dihadapi dalam memelihara kerukunan antar umat beragama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama. Selama tahun 2017 sampai dengan 2019 telah dibentuk 3 Desa Sadar Kerukunan, yakni tahun 2017 di Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi

Moutong, tahun 2018 di Desa Simoro Kec. Gumbasa Kab. Sigi, dan tahun 2019 di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso.



Pembinaan Aktor-Aktor KUB Tingkat Prov. Sulawesi Tengah



Kampanye Hidup Rukun Tk. SLTA/MA di Kab. Parigi Moutong



Dialog Lintas Agama dengan berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi di Tingkat Kab. Donggala



Peresmian Tugu FKUB di Desa Tambarana Desa Sadar Kerukunan Kab. Poso

Gambar 4 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah

1.1.3.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna

kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Sulawesi Tengah, adalah fakta masyarakat Sulawesi Tengah yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*". Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama di Sulawesi Tengah.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama telah dilaksanakan di tingkat Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018 melalui pembinaan wawasan multikulturasi bagi penyuluh lintas agama dengan jumlah peserta 90 orang, dialog moderasi beragama tahun 2016 dengan peserta 30 orang, dialog lintas agama tahun 2017 di Kankemenag Kab. Parigi Moutong dengan jumlah peserta 100 orang, dan tahun 2019 sebanyak 6 kali kegiatan di Kankemenag Kab. Kab. Buol, Donggala, Banggai Laut, Tolitoli, Touna, dan Sigi dengan total jumlah peserta 350 orang, yang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan yang dilaksanakan dengan mempromosikan ujaran keagamaan yang moderat.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-religi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,

tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengkoordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

1.1.4 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

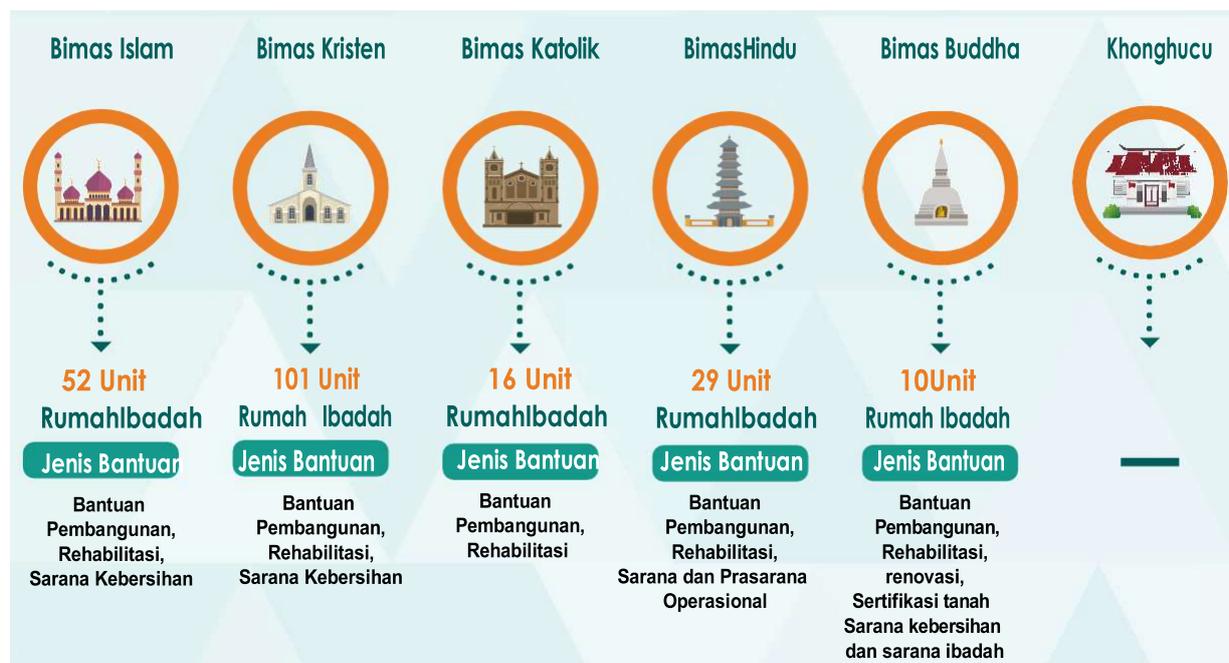
Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai institusi vertikal. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi.

1.1.4.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya, fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Saat ini di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia 3.554 masjid, 1.161 mushola, 2.683 gereja Kristen, 174 gereja Katolik, 234 pura, dan 20 rumah ibadah Buddha (arama, mahavihara, vihara, cetiya, tempat ibadah tridharma, kelenteng).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Dalam kurun waktu 5

tahun ke belakang, telah diberikan bantuan untuk peningkatan fasilitas rumah ibadah dengan rincian sebagai berikut:



Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Gambar 5
Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019

1.1.4.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh

agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatori SAPA penyuluh.

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2019, jumlah penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam sebanyak 57 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS sebanyak 2.857 orang yang tersebar di seluruh provinsi dengan jumlah ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk Islam 1 : 2.174 artinya 1 orang penyuluh harus melayani 2.174 orang.

Penyuluhan Agama Islam dilakukan dalam berbagai program baik secara langsung maupun dengan cara siaran penerangan agama Islam, pada program siaran yang mendapat apresiasi masyarakat luas diantaranya penyuluhan agama Islam melalui RRI Palu dan TVRI Sulteng yang diselenggarakan setiap bulan Ramadhan dan Safari Ramadhan dari masjid ke masjid dengan melibatkan para mubaligh yang berkompeten. Dalam rangka peningkatan kualitas mubaligh, maka diselenggarakan kegiatan pengkaderan Mubaligh Muda secara berkala dan berkelanjutan.

Untuk pemeluk agama Kristen jumlah tenaga penyuluh PNS sebanyak 7 orang, dan Non PNS sebanyak 170 orang yang tersebar di seluruh provinsi dengan rasio ketersediaan penyuluh Agama Kristen dibandingkan dengan jumlah penduduk Kristen 1 : 3.453.

Di lingkungan Katolik, penyuluh agama berstatus PNS hanya 1 orang, dan tenaga penyuluh non PNS Katolik berjumlah sebanyak 50 orang dengan rasio ketersediaan penyuluh Agama Katolik dibandingkan dengan jumlah penduduk Katolik 1 : 964.

Saat ini tenaga penyuluh agama Hindu berstatus PNS sebanyak 4 orang, dan Penyuluh Non PNS agama Hindu berjumlah 60 orang dengan rasio ketersediaan penyuluh Agama Hindu dibandingkan dengan jumlah penduduk Hindu 1 : 2.543.

Sementara itu agama Buddha telah memiliki 2 orang penyuluh PNS dan 26 orang Non PNS dengan rasio ketersediaan penyuluh Agama Hindu dibandingkan dengan jumlah penduduk Hindu 1 : 866.

Dengan jumlah penyuluh agama yang belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah merekrut penyuluh Non PNS yang berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua bagi penyuluh agama. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Di samping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang

dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama.

1.1.4.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung layanan, tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki tanggung jawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, bimbingan perkawinan dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA.

Dari upaya kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif:

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di semua KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;

- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000 calon pengantin/wali nikah setor langsung di bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya.

Jumlah kecamatan di Sulawesi Tengah berjumlah 174 kecamatan, dan gedung KUA yang ada berjumlah 163 unit. Dari jumlah tersebut, ada 9 gedung KUA yang rusak berat, dan 37 unit KUA yang belum memiliki gedung. Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, hingga tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah membangun 33 gedung balai nikah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis sistem informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan informasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.

1.1.4.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Al-Quran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M. PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah:

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan Nikah Rujuk;
- Pelaksanaan pelayanan Nikah Rujuk;
- Penasehatan dan konsultasi Nikah Rujuk;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan Nikah Rujuk;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Hingga tahun 2019 tercatat ada 154 penghulu yang tersebar di 163 KUA yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah penghulu yang ada masih terbilang kurang. Idealnya dalam setiap kecamatan terdapat tiga hingga lima penghulu yang bertugas di KUA. Untuk mengisi kekurangan penghulu ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan inpassing, yaitu memberikan pelatihan dan diklat kepada pegawai yang dianggap mampu menjadi penghulu, kemudian diberikan SK dan diangkat menjadi penghulu.

Untuk meningkatkan kualitas penghulu yang berintegritas dan amanah, sepanjang tahun 2015-2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan berbagai kegiatan orientasi dan sosialisasi sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penghulu. Penghulu juga diharapkan bisa menjadi mentor pada program pendidikan sebelum menikah yang diadakan di KUA. Setiap penghulu dituntut memahami aturan yang terkait tugas dan fungsinya, sehingga dalam memberi pelayanan tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan.

1.1.4.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah.

Secara hierarkis, penyelenggara haji meliputi penyelenggara haji tingkat pusat, penyelenggara haji tingkat provinsi, penyelenggara haji tingkat kabupaten atau kota, dan penyelenggara haji di Arab Saudi. Penyelenggara tingkat pusat dilaksanakan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Penyelenggaraan haji tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai penanggung jawab dan koordinator, sedangkan pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan ibadah haji provinsi, dan dibantu Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai sekretaris. Penyelenggaraan haji tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati atau walikota sebagai penanggungjawab dan koordinator, sedangkan pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan ibadah haji kabupaten/kota, dan dibantu Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai sekretaris.

Jumlah jamaah haji yang berangkat melalui Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Selama ini Sulawesi Tengah bersama Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara tergabung dalam Embarkasi Balikpapan. Untuk kedepannya pemerintah provinsi telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Sulawesi Tengah bisa menjadi embarkasi antara. Jumlah jamaah haji asal Sulawesi Tengah, sebenarnya sudah boleh dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi embarkasi antara, sebab pada tahun 2019 saja jumlah jamaah haji mencapai kurang lebih 2.000 jamaah. Namun untuk menjadi embarkasi antara, ada beberapa fasilitas pendukung yang harus dipersiapkan, diantaranya revitalisasi Asrama Haji.

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* berdasarkan urutan kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem *online* juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan *main system* milik Garuda

Indonesia sebagai *host* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996.

Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara *real time*.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.

1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji.
2. Dengan diberlakukannya kebijakan *e-haji* oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat *e-reader*.
3. Sebelum pemberangkatan, jamaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental.
4. Untuk kenyamanan dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jamaah haji, maka dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi administratif dan teknis.

Di bidang umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pembinaan penyelenggaraan ibadah umrah melalui pelaksanaan regulasi, penguatan kelembagaan, perizinan PPIU secara *online* dan akreditasi PPIU. Penyusunan 9 (sembilan) regulasi diantaranya peraturan tentang Pembinaan, Bank Garansi, Pengawasan, Rekomendasi, dan Verifikasi. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan satuan kerja kabupaten/kota serta pemberdayaan penyuluh KUA. Kegiatan Pelayanan Perizinan PPIU secara elektronik yang terdiri atas permohonan

izin operasional sebagai PPIU, perubahan data PPIU, dan pengajuan permohonan akreditasi. Sejak tahun 2016-2019, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 5 izin operasional PPIU yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah PPIU di Sulawesi Tengah yang Ditetapkan
Izin Operasional Tahun 2016-2019

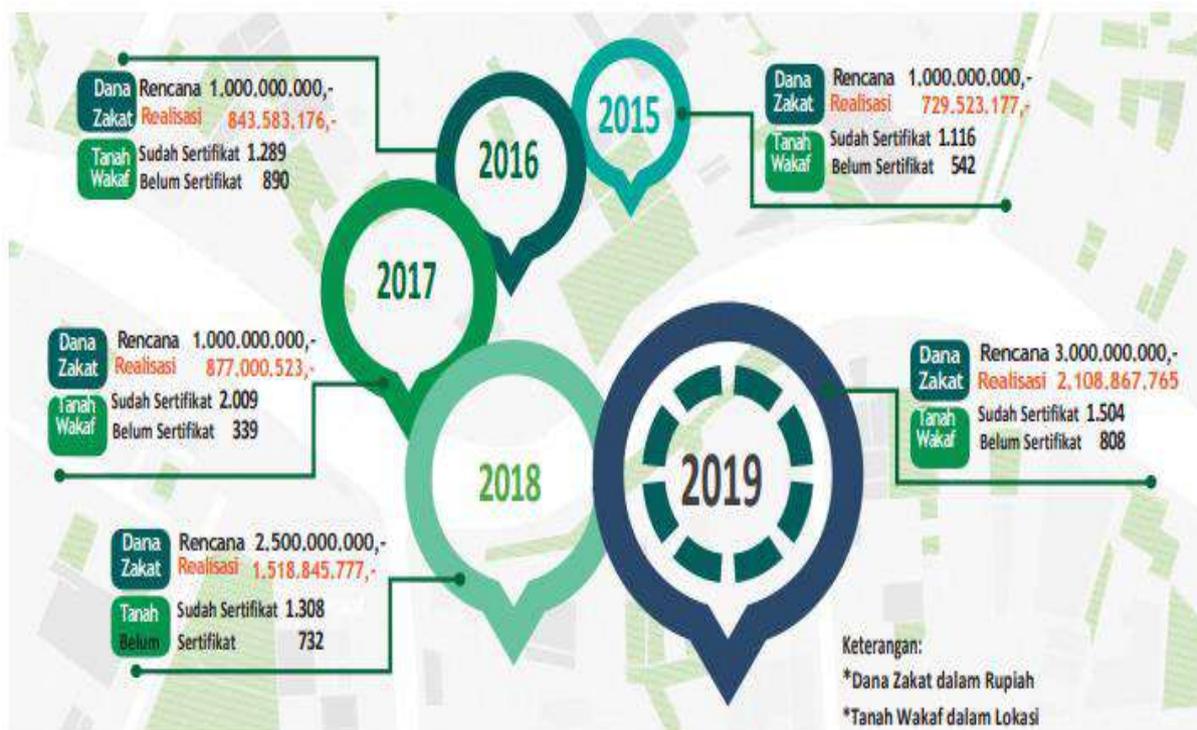
No.	Tahun	Jumlah PPIU	Nama dan Nomr Izin PPIU
1	2016	1	1. PT. Bina Wisata Citra Mandiri Nomor 557 Tahun 2016
2	2017	2	2. PT. Rajawali Ashab Mandiri Tour & Travel Nomor 826 Tahun 2017 3. PT. Annisa Sam Alamin Nomor 904 Tahun 2017
3	2018	1	4. PT. Syawarifiyyah Nomor 605 Tahun 2018
4	2019	1	5. PT. Babussalam Citra Mandiri Nomor 790 Tahun 2019

Sumber : Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. Sulteng, 2020

Akreditasi PPIU dilakukan dengan *Memorandum of Undertanding (MoU)* dengan Komite Akreditasi Nasional tentang Akreditasi Lembaga Akreditasi PPIU.

1.1.5 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Lembaga keagamaan telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi penganut berbagai agama. Selain itu, lembaga keagamaan telah berhasil menghimpun dana sosial keagamaan yang tidak hanya untuk mendukung pendidikan keagamaan tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan umat, yang hasilnya di beberapa lembaga sangat menggembirakan. Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan tersebut ternyata cukup besar, hal ini sebagai mana ditunjukkan dalam Gambar 6 berikut:



Sumber : Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tengah, 2020

Keterangan:

Rencana dana zakat = Target pengumpulan BAZNAS dalam tahun berjalan

Realisasi dana zakat = Realisasi pengumpulan BAZNAS pada tahun berjalan

Gambar 6
Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan, pertama, potensi dana zakat dalam waktu 4 (empat) tahun meningkat setiap tahunnya (yang ditunjukkan pada data rencana dan realisasi). Peningkatan seperti ini diperkirakan akan terjadi terus lima tahun ke depan. Kedua, jumlah tanah yang diwakafkan oleh masyarakat meningkat terus sehingga pada tahun 2019 berjumlah 2.312 lokasi yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah. Dari sejumlah itu 808 lokasi telah berhasil disertifikasi. Capaian target sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan rencana karena: 1) proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama; 2) anggaran pengelolaan pengurusan sertifikasi yang disediakan belum mencakup jenis dana yang diperlukan dalam proses sertifikasi; 3) wewenang Kementerian Agama terbatas hanya sampai pada penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat KUA, sementara penyelesaian sertifikat selanjutnya berada dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Bimbingan Masyarakat Islam juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.

Melalui Pembimbing Masyarakat Katolik, skema ekonomi keagamaan berasal dari Kolekte, Stipendium, dan Iuran Stole yang dilakukan oleh setiap gereja didorong untuk ditingkatkan, selain pengumpulan dana Badan Amal Kasih Katolik (BAKAT).

Sementara itu, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk ditingkatkan. Melalui Pembimbing Masyarakat Hindu juga digali potensi ekonomi keagamaan yang berasal dari dana punia. Sementara pada agama Buddha, ekonomi keagamaan dapat bersumber dari Amisa Dana, Paricaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana. Untuk meningkatkan pendapatan dari potensi ekonomi keagamaan secara optimal, kebijakan pemberian insentif perlu dibuat.

1.1.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: 1) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; 2) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.6.1 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Hasil capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Capaian Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Hasil Capaian Kinerja
2016	95,39%
2017	97,72%
2018	92,51%
2019	96%

Sumber: Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Sulteng, 2020

Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan: 1) tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kinerjanya; 2) kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil meningkat, dan 3) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik pada Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah. Selain itu kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal dipenuhi secara lengkap.

1.1.6.1 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan yaitu:

- a. terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (pola pikir dan budaya kerja aparatur);
- b. terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*);

- c. terlaksananya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- d. dihasilkannya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- e. terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- f. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. meningkatnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- h. meningkatnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan dan ditandai dengan meningkatnya nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2018 memperoleh skor 60,60% dan di tahun 2019 meningkat di angka 88,4%.

Hal yang perlu dipahami bahwasannya bagian terpenting dalam pengukuran ketercapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu cara penilaian yang dilakukan adalah mengkuantifikasi kualitas ketercapaian, sehingga output yang dihasilkan adalah kualitas dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bukan kuantitas (jumlah) output yang dihasilkan. Sehingga pada akhirnya, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas "*evidence based*" melainkan "*impact based*".

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari pengejawantahan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata laksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan 128 satuan kerja, peningkatan nilai tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama telah dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun 2019, beberapa kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten mulai mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan informasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk 1 unit PTSP di Kantor Wilayah dan 10 unit PTSP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten, 1 unit PTSP di Madrasah Aliyah Negeri Tolitoli dan 1 unit PTSP di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tolitoli. Ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya berdasarkan sistem meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).

1.1.7 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain: 1) APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2) APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3) APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4) APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5) APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6) APM MTs/Wustha/SMPTK; 7) APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman.

Tabel 4
Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga,
Jumlah Lembaga, dan Jumlah Peserta Didik
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

No.	Jenis	Unit Eselon I	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum Berciri Khas Agama	Ditjen Pendidikan Islam	1. RA	111	4.355
			2. MI	207	24.079
			3. MTs	282	38.269
			4. MA	163	19.772
2	Pendidikan Keagamaan	Ditjen Pendidikan Islam	1. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Wustha	2	307
			2. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Salafiyah Ulya	2	131
			3. PTK Islam (PTKIN dan PTKIS)	1	1.670
		Ditjen Bimas Kristen	1. SDTK	1	89
			2. SMPTK	2	35
			3. SMTK/SMAK	4	129
		Ditjen Bimas Hindu	1. Adhi Widya Pasraman	1	29
			2. Madyama Widya Pasraman	1	56
			3. PTK Hindu	1	84
		Ditjen Bimas Buddha	1. Nava Dhammasekha	1	-
Total				779	89.005

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Sementara itu, perkembangan capaiannya per tahun dalam peningkatan akses selama lima tahun terakhir disajikan pada Gambar 7 s.d 13.



Gambar 7
Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman MA/Ulya/SMTK/SMAK
 Tahun 2015-2019



Gambar 10
Grafik APK
 Tahun 2015-2019



Gambar 8
Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman
 Tahun 2015-2019



Gambar 11
Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya
 Tahun 2015-2019



Gambar 9
Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/MadyamaWidya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 12
Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019



Gambar 13
Grafik APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019

Keterangan Gambar:

Satuan APK dan APM = Persentase

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, tahun 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikan tertentu. Mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SMP, SMA dan SMK, maka batas usia paling rendah masuk SD adalah 6 (enam), jenjang SMP paling tinggi usia 15 tahun dan SMA/SMK paling tinggi usia 21 tahun, maka APK pada jenjang MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman di Sulawesi Tengah terhadap jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada usia 6 s.d. 13 tahun.

APK pada jenjang MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman di Sulawesi Tengah terhadap jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada usia 12 s.d. 15 tahun.

APK pada jenjang MA/Ulya/SMATK/Utama Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MA/Ulya/SMATK/Utama Widya Pasraman di Sulawesi Tengah terhadap jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada usia 15 s.d. 21 tahun.

Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

1.1.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut:



Gambar 14
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK
Tahun 2015-2019



Gambar 15
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK
Tahun 2015-2019

Masih rendahnya nilai Ujian Nasional (UN) disebabkan oleh dua hal, yaitu: (i) tahun 2016 mulai diterapkannya penyelenggaraan UN berbasis komputer yg memiliki tingkat akuntabilitas penyelenggaraan lebih tinggi, (ii) meningkatnya tingkat kesukaran soal, dan (ii) diintegrasikannya soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill* (HOTS) dalam tes.

Untuk meningkatkan integritas peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antar atrilogi pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas, dan sewarna dengan bingkai pembiasaan dan keteladanan.

Pengembangan integritas peserta didik di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya oleh kepala satuan pendidikan yang secara terus menerus dan berkesinambungan mengeluarkan kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan perilaku integritas, misalnya: dengan menekan perilaku mencontek dengan membuat slogan: "kerja mandiri itu

menyenangkan”, ”mencontek itu tidak asyik”, dan ”cari bocoran tidak asyik”.

Peningkatan integritas siswa dilakukan oleh guru-guru, khususnya guru agama melalui keteladanan. Selain itu, guru membuat ”buku siswa” yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan. Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan keteladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada masa-masa mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah lingkungan strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi (kekuatan) yang memengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi mendatang.

1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan antar Umat Beragama

Dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, ada beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dimiliki Sulawesi Tengah, dengan rincian sebagaimana Tabel 5 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini;	Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai <i>platform</i> digital untuk pembelajaran jarak jauh (<i>on-line</i>) menjadi tantangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial;	Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau;	Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan <i>platform</i> digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam menangkap ceruk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal;
2.	Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci dan silaturahmi antar sesama;	Penyuluhan agama diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antar manusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah;	Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi penyuluhan kesalehan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama;	Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;
3.	Selain penyuluh agama, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan jumlah penyuluh agama;	Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T; dan	Belum adanya sistem pengendalian dan monitoring dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini; dan	Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniawan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat kepada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama; dan

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
4.	Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan.	Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi intra dan antarumat beragama. Melalui sarana tersebut turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportifitas.	Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial.	Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan esktrimisme beragama.

Memperhatikan potensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada: (1) meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*), (2) revitalisasi pembinaan keumatan dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial; (3) standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan; (4) optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan (5) pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.3 Penguohan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang mendukung penguohan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis di Sulawesi Tengah, diuraikan dalam Tabel 6 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;	Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB;	Belum semua amanat PBM dilaksanakan secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;	Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkungan aktor beragama atau pemerintahan;
2.	Karakteristik masyarakat Sulawesi Tengah yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;	Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatup aduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal;	Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik;	Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan raamah (anak, disabilitas, lansia);
3.	Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah dibangun 163 KUA di wilayah Sulawesi Tengah. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah di samping tugas lainnya.	Perkembangan digitalisasi berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;	Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia	Ada 9 gedung KUA dalam kondisi rusak berat dan 37 KUA belum memiliki gedung sendiri sehingga pelayanan KUA di gedung tersebut belum berjalan optimal. Kualitas Sumber daya manusia pendukungnya terbatas.

1.2.4 Penguksuhan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terdapat beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, diuraikan dalam Tabel 7 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Pendaftaran calon jemaah haji semakin meningkat. Melalui Siskohat, sistem pendaftaran dan pelaporan haji terpadu sangat intensif;	Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;	Integrasi rekam kesehatan jemaah dengan sistem aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan;	Kuota haji yang tersedia relatif stagnan sehingga memperpanjang waktu tunggu keberangkatan calon jemaah haji. Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan terus menerus akan tetapi hasil yang diperoleh terbatas;
2.	Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan masyarakat antusias dalam mencari informasi yang berkaitan dengan ibadah haji;	Perbedaan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu penanganan yang spesifik dan cepat tanggap;	Petugas haji belum maksimal dibekali dengan kemampuan manajemen tanggap darurat;	Pembekalan perugas haji masih dilakukan secara konvensional;
3.	Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji dan umrah sudah dilakukan secara intensif;	Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi;	Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum diprogramkan untuk mempertahankan kualitas pengamalan ajaran agama secara berkesinambungan;	Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan alokasi dan petugas;
4.	Adanya peningkatan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang siap memfasilitasi jemaah dalam persiapan dan pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah.	Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperlukan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu.	Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggaraan ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi.	Masih banyak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: 1) efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; 2) penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi; dan 3) penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah.

1.2.5 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Terdapat beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, diuraikan dalam Tabel 8 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja wilayah maupun kota/kabupaten sudah berjalan cukup baik;	Ada 13 Kankemenag Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah perlu pengawasan intensif;	Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan;	Proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara komprehensif;
2.	Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama sudah mencapai opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018;	Potensi PNBPN yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal;	Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang;	Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan lambannya proses alih status kepemilikan;
3.	Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah.	Manajemen kinerja dan <i>merit system</i> yang selaras antara Pusat hingga Daerah dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja.	Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja.	Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan ke depan lebih difokuskan kepada: (1) peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif; (2) peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang *valid, reliabel, uptodate*, dan terintegrasi; (3) pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*); (4) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.

1.2.6 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Terdapat beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan akses layanan pendidikan di Sulawesi Tengah, diuraikan dalam Tabel 9 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Penerapan kurikulum 2013 merintis pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat diterapkan tanpa merubah kurikulum yang berlaku;	Kurikulum 2013 berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun);	Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja;
2.	Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan perundangan;	Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama;	Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama;	Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi;
3.	Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan "budi pekerti" dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;	Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;	Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal;	Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;
4.	Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin.	Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP.	Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya.	Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM.

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka peningkatan akses layanan pendidikan umum terutama yang berciri khas agama dan pendidikan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi: (a) peserta didik di daerah 3 T dan (b) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan; (2) pemberian BOS, bantuan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; (3) diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali; dan (4) mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.

1.2.7 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Terdapat beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan di Sulawesi Tengah yang diuraikan dalam Tabel 10 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, umat beragama dapat mengekspresikan identitas budaya; menempuh pendidikan; mendalami ajaran agama; meretas jalan kultural yang mendorong proses mobilitas sosial; dan menghasilkan sarjana-sarjana agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi;	Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran;	Sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang kualitas guru dan sarana prasarannya belum memadai;	Kualitas guru dan sarana prasarana yang belum optimal dan sebagian masih didukung oleh guru Non PNS dan persebaran guru PNS yang belum merata;
2.	Pemerintah telah memberikan BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah.	Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran.	Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kementerian Agama.	Proporsi dana BOS yang disediakan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: 1) peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran; 2) peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik; 3) peningkatan kualitas mental/karakter siswa; dan 4) peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu instansi pemerintah yang bersifat vertikal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

2.1 Visi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu **“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**.

Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) dari pada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) Tahun 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5);
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3);
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3);
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan

(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)

6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8)

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan Khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

2.3 Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas.

2.4. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mendukung 11 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Nilai kinerja penyuluh agama;
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
- c. Jumlah penyiari agama yang dibina kompetensi;
- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

Tujuan 2 : Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.

8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata Religi, Situs, Artefak);
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh: Pesparawi, MTQ, STQ, Utsawa, dan lain-lain);
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

Tujuan 3 : Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - e. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
 - f. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan keluarga sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.

6. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu.
7. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji.
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase keberlanjutan layanan (*continuity service*).

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;

- f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;

- g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;
 - Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;
 - Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan;
 - Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
 - Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 - Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh

- peningkatan kompetensi;
- c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - d. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
 - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1;
 - d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
- a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus;
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SMAK/Pesantren/Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - b. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
 - c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
3. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan;
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
4. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai *Opname Physic* BMN.
5. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
6. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
7. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;

- c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
8. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indikator kinerja kegiatan, yakni: persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
12. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang *dicounter*.
13. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan *reliable*.
14. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah pegawai, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

2.5 Nilai-nilai Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama menetapkan lima nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN pelaksana pembangunan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketakwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketakwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/ atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam nilai integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan

keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam nilai profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah- langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;

- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat memengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam nilai tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;

- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah memiliki strategi melalui 9 (sembilan) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
3. Program Pendidikan Islam;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. Program Kerukunan Umat Beragama.

Untuk tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
4. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;

4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
6. Pembinaan Administrasi Umum;
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan;
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam;
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen;
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik;
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik;
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu;
16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu;
17. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha;
18. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha;
19. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
20. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
21. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
22. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
23. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
24. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
25. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
26. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu;
27. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
28. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu;
29. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus;

30. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
31. Pembinaan Haji;
32. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu;
33. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah;
34. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
35. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam;
36. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
37. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen;
38. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik;
39. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu;
40. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha;
41. Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu;
42. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah;
43. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam;
44. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
45. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
46. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
47. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada Bab II.

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah serta masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 s.d. 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Di samping itu terdapat kegiatan yang sarannya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sedangkan anggarannya berada pada Unit Eselon I Pusat antara lain anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah, Bantuan Sarpras Madrasah Swasta, Pengadaan Kitab Suci (Al-Qur'an) dan Pengadaan Buku Nikah.

Adapun rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama sampai dengan 2024 melalui sumber pembiayaan APBN pada tabel berikut:

Tabel 11
Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	9.345.000	12.758.000	14.033.000	15.437.000	16.980.440
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	240.000	264.000	290.400	319.440
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	673.000	740.000	814.000	895.000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	6.930.000	7.6323.000	8.385.000	9.224.000	10.146.000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	586.000	645.000	709.000	780.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	457.000	503.000	553.000	609.000
Pembinaan Administrasi Umum	2.415.000	2.657.000	2.922.000	3.215.000	3.536.000
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	522.000	574.000	632.000	695.000
Program Kerukunan Umat Beragama	116.000	995.000	1.095.000	1.204.000	1.325.000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	116.000	995.000	1.095.000	1.204.000	1.325.000
Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.157.000	5.673.000	6.240.000	6.862.000	7.551.000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	937.000	1.031.000	1.134.000	1.247.000	1.372.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	170.000	187.000	206.000	226.000	249.000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	235.000	258.000	284.000	312.000	344.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	217.000	298.000	328.000	360.000	397.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	3.544.000	3.899.000	4.288.000	4.717.000	5.189.000
Program Pendidikan Islam	42.524.000	46.776.000	51.453.000	56.453.000	62.259.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	115.000	126.000	139.000	153.000	168.000
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	1.803.000	1.983.000	2.181.000	2.399.000	2.639.000
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	20.207.000	22.228.000	24.450.000	26.895.000	29.585.000
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	62.000	69.000	76.000	83.000	92.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	20.337.000	22.370.000	24.607.000	27.068.000	29.775.000

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	3.549.076	3.997.000	4.431.000	4.903.000	5.429.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	847.000	931.000	1.024.000	1.127.000	1.240.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	255.000	280.000	308.000	339.000	373.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	2.280.076	2.508.000	2.758.000	3.034.000	3.338.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	105.000	115.000	127.000	139.000	153.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	62.000	163.000	214.000	264.000	325.000
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	1.731.000	1.911.000	2.112.000	2.333.000	2.565.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	215.000	237.000	260.000	286.000	315.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	450.000	495.000	544.000	598.000	658.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	600.000	660.000	726.000	799.000	879.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	436.000	479.000	527.000	580.000	638.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	30.000	40.000	55.000	70.000	75.000
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	4.048.000	4.454.000	4.898.000	5.388.000	5.928.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	1.542.000	1.697.000	1.866.000	2.053.000	2.259.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.480.000	1.628.000	1.790.000	1.969.000	2.166.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	906.000	997.000	1.097.000	1.206.000	1.327.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	120.000	132.000	145.000	160.000	176.000
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	2.942.000	3.280.000	3.608.000	3.968.000	4.365.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	491.000	540.000	594.000	653.000	719.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	941.000	1.035.000	1.139.000	1.253.000	1.378.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	1.510.000	1.661.000	1.827.000	2.009.000	2.210.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	-	44.000	48.000	53.000	58.000
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	4.161.000	4.579.000	5.035.000	5.536.000	6.087.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	128.000	140.000	154.000	170.000	187.000
Pembinaan Haji	755.000	831.000	914.000	1.005.000	1.106.000
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	28.000	33.000	34.000	35.000	35.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.250.000	3.575.000	3.933.000	4.326.000	4.759.000

Sumber : Subbag Perencanaan, Data dan Informasi, 2020

Tabel 12
Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen					
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	240.000	264.000	290.400	319.440
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	673.000	740.000	814.000	895.000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	6.930.000	7.623.000	8.385.000	9.224.000	10.146.000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	586.000	645.000	709.000	780.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	457.000	503.000	553.000	609.000
Pembinaan Administrasi Umum	2.415.000	2.657.000	2.922.000	3.215.000	3.536.000
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	522.000	574.000	632.000	695.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.250.000	3.575.000	3.933.000	4.326.000	4.759.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	20.337.000	22.370.000	24.607.000	27.068.000	29.775.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	3.544.000	3.899.000	4.288.000	4.717.000	5.189.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	2.208.076	2.508.000	2.758.000	3.034.000	3.338.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	105.000	115.000	127.000	139.000	153.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	600.000	660.000	726.000	799.000	879.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	436.000	479.000	527.000	580.000	638.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	906.000	997.000	1.097.000	1.206.000	1.327.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	120.000	132.000	145.000	160.000	176.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	-	44.000	48.000	53.000	58.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	1.510.000	1.661.000	1.827.000	2.009.000	2.210.000
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama	5.316.000	6.716.000	7.385.000	8.118.000	8.931.000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	116.000	995.000	1.095.000	1.204.000	1.325.000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	937.000	1.031.000	1.134.000	1.247.000	1.372.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	170.000	187.000	206.000	226.000	249.000

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	235.000	258.000	284.000	312.000	344.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	271.000	298.000	328.000	360.000	397.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	128.000	140.000	154.000	170.000	187.000
Pembinaan Haji	755.000	831.000	914.000	1.005.000	1.106.000
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	28.000	33.000	34.000	35.000	35.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	255.000	280.000	308.000	339.000	373.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	450.000	495.000	544.000	598.000	658.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.480.000	1.628.000	1.790.000	1.969.000	2.166.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	491.000	540.000	594.000	653.000	719.000
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	269.000	398.000	484.000	570.000	660.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	115.000	126.000	139.000	153.000	168.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam					
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	62.000	163.000	214.000	264.000	325.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah					
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	62.000	69.000	76.000	83.000	92.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	30.000	40.000	55.000	70.000	75.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu					
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha					
Program PAUD & Wajib Belajar 12 Tahun	3.545.000	3.900.000	4.289.000	4.719.000	5.192.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	847.000	931.000	1.024.000	1.127.000	1.240.000
Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah					
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	215.000	237.000	260.000	286.000	315.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	1.542.000	1.697.000	1.866.000	2.053.000	2.259.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	941.000	1.035.000	1.139.000	1.253.000	1.378.000

Sumber : Subbag Perencanaan, Data dan Informasi, 2020

PENUTUP

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Di samping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari semua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Sulawesi Tengah,

Rusman Langke

PENUTUP

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Di samping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari semua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Sulawesi Tengah,



Rusman Langke

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 5 PROGRAM

Lampiran II

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama										116	995	1.095	1.204	1.325	Subbag Ortala dan KUB
SK.13.5620.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama														
IKSK.13.5620.1.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	95	95	95	95	95	95						
IKSK.13.5620.1.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	840	850	900	910	920	930						
IKSK.13.5620.1.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Lokasi	1	2	3	4	5	6						
SK.13.5620.2	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa														
IKSK.13.5620.2.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga	14	14	14	14	14	14						
IKSK.13.5620.2.2	Jumlah forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	0	14	14	14	14	14						
SK.13.5620.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)														
IKSK.13.5620.3.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		%	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
SK.13.5620.4	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya														
IKSK.13.5620.4.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya		Kegiatan	10	15	20	30	40	50						
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN										-	240	264	290	319	Subbag Kepegawaian dan Hukum
SK.1.2098.1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum														
IKSK.1.2098.1.1	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan		%	10	50	60	75	80	85						
IKSK.1.2098.1.2	Persentase produk hukum yang diterbitkan		%	10	30	40	50	75	85						
IKSK.1.2098.1.3	Persentase kasus hukum yang terselesaikan		%	10	40	50	75	85	95						
IKSK.1.2098.1.4	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan		Kegiatan	0	0	1	2	3	4						
2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian										-	673	740	814	895	Subbag Kepegawaian dan Hukum

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)														
IKSK.1.2099.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja		%	90	90	100	100	100	100						
IKSK.1.2099.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti		%	90	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2099.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan		%	50	50	60	75	80	95						
IKSK.1.2099.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	50	60	75	80	85	90						
IKSK.1.2099.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensinya		%	30	40	50	60	70	85						
IKSK.1.2099.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		%	90	95	95	95	95	95						
IKSK.1.2099.1.7	Persentase data ASN yang diupdate		%	90	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2099.1.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		%	60	70	75	80	80	90						
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN										6.93	7.623	8.385	9.224	10.146	Subbag Keuangan dan BMN
SK.1.2100.1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan														
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		Dokumen	8	8	8	8	8	8						
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	50	70	80	85	100	100						
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	97.84	98	98	98.2	98.25	98.3						
IKSK.1.2100.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama		%	75	80	80	85	85	90						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2100.1.5	Persentase pencapaian dan penetapan target PNBPN dan BLU		%	100	100	100	100	100	100						
SK.1.2100.2	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel														
IKSK.1.2100.2.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	10	50	50	50	55	55						
IKSK.1.2100.2.2	Persentase tanah yang bersertifikat		%	80	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2100.2.3	Persentase nilai <i>Opname Physic (OP)</i> BMN		%	100	100	100	100	100	100						
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana										-	586	645	709	780	Subbag Ortala dan KUB
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi														
IKSK.1.2101.1.1	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi		%	50	60	65	70	75	80						
IKSK.1.2101.1.2	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan		Dokumen	NA	5	7	9	11	13						
IKSK.1.2101.1.3	Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru		%	NA	50	60	65	70	80						
IKSK.1.2101.1.4	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis		%	NA	25	30	35	40	45						
IKSK.1.2101.1.5	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	10	15	20	30	50	75						
IKSK.1.2101.1.7	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	35	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5						
SK.1.2101.2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi														
IKSK.1.2101.2.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	25	25	25	30	30	35						
IKSK.1.2101.2.2	Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Satker	14	15	16	17	18	19						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	14	28	42	56	70	84						
IKSK.1.2101.2.4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	3	10	15	20	25	50						
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan										416	457	503	553	609	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
SK.1.2102.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran														
IKSK.1.2102.1.1	Persentase <i>output</i> perencanaan yang berbasis data		%	90	90	93	95	95	100						
IKSK.1.2102.1.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90	90	90	95	100	100						
SK.1.2102.2	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran														
IKSK.1.2102.2.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas		%	92.26	93	94	95	96	96						
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti		%	70	70	70	75	75	80						
2103-Pembinaan Administrasi Umum										2.415	2.657	2.922	3.215	3.536	Subbag Umum dan Humas
SK.1.2103.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor														
IKSK.1.2103.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	60,00	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00						
SK.1.2103.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa														
IKSK.1.2103.2.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu		%	97	98.06	99.03	100	100	100						
IKSK.1.2103.2.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik		%	55	56.41	85.79	100	100	100						
IKSK.1.2103.2.3	Persentase surat yang diarsipkan		%	72	74.21	83.26	100	100	100						
IKSK.1.2103.2.4	Persentase menurunnya lelang gagal		%	65	68.05	74.95	85.27	89.6	98.85						
IKSK.1.2103.2.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding		%	50	52.25	71.65	82.77	86.9	96.85						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan										-	522	574	632	695	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
SK.1.2106.1 Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi															
IKSK.1.2106.1.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		Kegiatan	100	120	130	140	145	150						
IKSK.1.2106.1.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di <i>counter</i>		%	90	90	91	93	95	100						
IKSK.1.2106.1.3	Persentase opini positif berita Kemenag		%	75	75	77.5	80	87.5	100						
SK.1.2106.2 Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi															
IKSK.1.2106.2.2	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (<i>Mora One Search</i>)		Unit	0	0	1	5	10	14						
IKSK.1.2106.2.3	Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet		Satker	0	11	36	62	82	110						
IKSK.1.2106.2.4	Persentase data agama dan pendidikan yang <i>valid</i> , dan <i>reliable</i>		%	60	60	70	80	90	100						
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam										3.544	3.899	4.288	4.717	5.189	Bidang Bimas Islam
SK.1.2125.1 Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2125.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	50,00	50,00	64,00	76,00	82,00	89,00						
SK.1.2125.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.1.2125.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2125.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00						
SK.1.2125.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2125.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70	70	80	80	90	100						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2125.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	70	70	80	90	100	100						
IKSK.1.2125.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	55	55	60	70	80	90						
SK.1.2125.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.1.2125.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
IKSK.1.2125.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	70,00	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.1.2125.5	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.1.2125.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	80,00	81,00	85,00	87,00	90,00	90,00						
IKSK.1.2125.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	80	80	90	100	100	100						
IKSK.2.2104.1.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		Orang	1.5	1.5	4	5	6	7						
IKSK.2.2104.1.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah		Orang	2.56	2.56	5.9	5.9	6	6.2						
IKSK.2.2104.1.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina		Orang	152	152	152	152	152	152						
IKSK.2.2104.1.6	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan		Dokumen	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2104.2	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga							937	1.031	1.134	1.247	1.372			
IKSK.2.2104.2.1	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah		Pasangan	300	300	400	500	600	650						
2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf										170	187	206	226	249	Bidang Bimas Islam
SK.2.2122.1	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2122.1.1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah		%	20	20	20	20	34	53						
IKSK.2.2122.1.2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi		%	1,1	1,1	1,8	2,4	2,8	4,6						
IKSK.2.2122.1.3	Persentase lembaga zakat yang dibina		%	4,02	4,02	50,3	50,6	60	73,03						
SK.2.2122.2	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf														
IKSK.2.2122.2.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina		%	2,01	2,01	40,05	60,05	70	80						
IKSK.2.2122.2.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan		%	10	10	15	15	15	20						
IKSK.2.2122.2.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		%	3,32	3,32	5,41	8,55	15	17,89						
SK.2.2122.3	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat														
IKSK.2.2122.3.1	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah		%	2	2	6	12	14	15						
IKSK.2.2122.3.2	Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan		%	20	20	40	50	50	60						
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam										235	258	284	312	344	Bidang Bimas Islam
SK.2.2123.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama														
IKSK.2.2123.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	90	90	90	90	90	100						
IKSK.2.2123.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	20	20	20	30	40	47						
IKSK.2.2123.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	14	14	14	14	14	14						
IKSK.2.2123.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	500	500	600	733	765	885						
SK.2.2123.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama														
IKSK.2.2123.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	2	2	6	12	14	15						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2123.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Lokasi	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2123.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.2.2123.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	80	80	90	100	100	100						
SK.2.2123.4	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.2.2123.4.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	14	14	14	14	14	14						
SK.2.2123.5	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.2.2123.5.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2123.6	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.2.2123.6.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	8	8	8	8	8	8						
SK.2.2123.7	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.2.2123.7.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll)		Kegiatan	14	14	14	14	14	14						
SK.2.2123.8	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2123.8.1	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00						
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah										271	298	328	360	397	Bidang Bimas Islam
SK.2.2124.1	Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama														
IKSK.2.2124.1.1	Persentase konflik intra umat beragama yang ditindaklanjuti		%	1	1	20	20	20	20						
SK.2.2124.2	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.2.2124.2.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2124.2.2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina		Orang	100	100	100	200	200	300						
IKSK.2.2124.2.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya		Orang	28	28	28	38	40	45						
IKSK.2.2124.2.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan		Lokasi	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2124.3	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.2.2124.3.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi		Dokumen	1	1	1	1	1	1						
IKSK.2.2124.3.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	14	14	14	14	14	14						
SK.2.2124.4	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2124.4.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	200	200	400	450	500	550						
IKSK.2.2124.4.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	300	300	300	300	300	300						
IKSK.2.21204.4.3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan		Kegiatan	40	40	70	90	150	200						
IKSK.2.2124.4.4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat		Lokasi	50	50	60	70	80	90						
IKSK.2.2124.4.5	Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina		Orang	30	30	30	40	50	50						
IKSK.2.2124.4.6	Jumlah POB yang memenuhi standar		Lokasi	0	0	1	1	1	1						
IKSK.2.2124.4.7	Jumlah lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya		Lembaga	1	1	1	1	1	1						
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam										20.337	22.37	24.607	27.068	29.775	Bidang Pendidikan Madrasah
SK.1.2135.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														
IKSK.1.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	68,00	70,00	71,00	72,00	78,00	80,00						
SK.1.2135.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.1.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00							
IKSK.1.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	-	-	-	-	-	-							
SK.1.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.1.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	-	-	-	-	-	-							
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	-	-	-	-	-	-							
IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	-	-	-	-	-	-							
SK.1.2135.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.1.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	-	-	-	-	-	-							
IKSK.1.2135.4.2	Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	-	-	-	-	-	-							
SK.1.2135.5	Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.1.2135.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	-	-	-	-	-	-							
IKSK.1.2135.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	-	-	-	-	-	-							
4422-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah																Bidang Pendidikan Madrasah
SK.3.4422.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.3.4422.1.1	Persentase siswa madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	NA	50	60	70	80	90							
IKSK.3.4422.1.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	1,000	2,000	5,000	6,000	7,000	8,000							
SK.3.4422.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif															

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4422.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	63	70	71	72	73	80						
IKSK.3.4422.2.2	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	52	62	68	70	71	75						
IKSK.3.4422.2.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan		Lembaga	NA	2	5	5	5	7						
IKSK.3.4422.2.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan		Lembaga	NA	7	7	7	7	10						
SK.3.4422.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.3.4422.3.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	NA	50,00	52,00	58,00	60,00	70,00						
SK.3.4422.4	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.3.4422.4.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	3	4	5	10	15	20						
IKSK.3.4422.4.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	3	4	5	10	15	20						
SK.3.4422.5	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi														
IKSK.3.4422.5.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4422.6	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.4422.6.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.4422.6.2	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4422.7	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan														
IKSK.3.4422.7.1	Persentase madrasah yang mendapatkan pelatihan sistem e-RKAM		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4422.8	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.3.4422.8.1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4422.8.2	Persentase madrasah yang ramah anak		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3.4422.9	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan														
IKSK.3.4422.9.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan		Kegiatan	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4422.9.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina		Unit	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4422.10	Menguatnya penyelenggaraan pendidikan vokasi														
IKSK.3.4422.10.1	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang		%	-	-	-	-	-	-						
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah										62	69	76	83	92	Bidang Pendidikan Madrasah
SK.3.2133.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.3.2133.1.1	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	4	13	13	13	13	13						
IKSK.3.2133.1.2	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	5	8	17	18	19	25						
SK.3.2133.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.3.2133.2.1	Persentase guru pada madrasah yang lulus sertifikasi		%	70	NA	72	75	76	76						
IKSK.3.2133.2.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	7	12	15	17	17.5	24						
IKSK.3.2133.2.3	Persentase kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0.18	0.4	8	9	9	9						
IKSK.3.2133.2.4	Persentase guru madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0.02	0.04	12	12	12	12						
SK.3.2133.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.3.2133.3.1	Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	46.5	45.5	46.5	48	49	49.5						
IKSK.3.2133.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah		Orang	300	90	90	90	90	90						
SK.3.2133.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik														
IKSK.3.2133.4.1	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG		%	1	1.5	2	2.5	4	5						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.2133.4.2	Persentase calon pengawas yang menerima beasiswa S2		%	1.5	2	2.1	2.2	2.3	2.4						
SK.3.2133.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan														
IKSK.3.2133.5.1	Persentase guru pada madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.3.2133.5.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	NA	NA	50,00	85,00	100,00	100,00						
SK.3.2133.6	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi														
IKSK.3.2133.6.1	Jumlah guru MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi		Orang	20	25	80	90	100	150						
4433-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam															Bidang PAKIS
SK.3.4433.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama														
IKSK.3.4433.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat		%	NA	0.25	0.4	0.42	0.43	0.45						
IKSK.3.4433.1.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Qur'an		%	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00						
SK.3.4433.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.3.4433.2.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	80,00	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00						
SK.3.4433.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.3.4433.3.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	NA	10,00	13,00	16,00	20,00	25,00						
SK.3.4433.4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.3.4433.4.1	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4433.4.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4433.4.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4433.4.4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.3.4433.5.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.6	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.3.4433.6.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.7	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi melalui peningkatan kualifikasi pendidik														
IKSK.3.4433.7.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti PPG		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4433.7.2	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah berkualifikasi minimal S1		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi														
IKSK.3.4433.8.1	Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	NA	NA	20	50	80	120						
SK.3.4433.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.3.4433.9.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan budaya mutu		%	NA	NA	50	55	780	100						
IKSK.3.4433.9.2	Persentase santri pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	NA	NA	2	2	2	3						
SK.3.4433.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.3.4433.10.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	NA	50	55	65	85	100						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.4433.10.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan														
IKSK.3.4433.11.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4433.11.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina		Unit	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.12	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi														
IKSK.3.4433.12.1	Jumlah guru/instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti peningkatan kompetensi		Orang	NA	2	4	6	7	9						
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam										115	126	139	153	168	Bidang PAKIS
SK.3.2127.1	Memperkuat muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama														
IKSK.3.2127.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama		%	40,00	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00						
IKSK.3.2127.1.2	Persentase guru pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00						
IKSK.3.2127.1.3	Persentase pengawas pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00						
IKSK.3.2127.1.4	Persentase mahasiswa muslim di PTU yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.2127.1.5	Persentase dosen pendidikan agama Islam di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.2127.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.3.2127.2.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi memperoleh peningkatan kompetensi		%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00						
SK.3.2127.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.2127.3.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00						
SK.3.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik														
IKSK.3.2127.4.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.2127.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1		%	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
SK.3.2127.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan														
IKSK.3.2127.5.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada Sekolah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
SK.3.2127.6	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan														
IKSK.3.2127.6.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	NA	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00						
IKSK.3.2127.6.2	Persentase pengawas pendidikan agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	NA	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00						
2129-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah										20.207	22.228	24.45	26.895	29.585	Bidang Pendidikan Madrasah
SK.4.2129.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.4.2129.1.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	70	71	73	75	78	80						
IKSK.4.2129.1.2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	75	77	79	80	81	82						
IKSK.4.2129.1.3	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	78	79	80	83	85	87						
IKSK.4.2129.1.4	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	79	80	83	85	88	89						
IKSK.4.2129.1.5	Persentase madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	60	61	62	65	66	69						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.4.2129.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.4.2129.2.1	Jumlah siswa MI penerima BOS		Orang	24079	24079	25283	26547	27874	29268						
IKSK.4.2129.2.2	Jumlah siswa MTs penerima BOS		Orang	38269	38269	40182	42192	44301	46516						
IKSK.4.2129.2.3	Jumlah siswa MA penerima BOS		Orang	19772	19772	20761	21799	22889	24033						
IKSK.4.2129.2.4	Persentase siswa MI penerima PIP		%	9	10	10	10	11	11.5						
IKSK.4.2129.2.5	Persentase siswa MTs penerima PIP		%	10	11	12	12	12	13						
IKSK.4.2129.2.6	Persentase siswa MA penerima PIP		%	11	12.5	12.5	12.5	12.5	13.5						
IKSK.4.2129.2.7	Jumlah madrasah yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	-	-	-	-	-	-						
SK.4.2129.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKSK.4.2129.3.1	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Orang	4355	4355	4573	4801	5041	5294						
SK.4.2129.4	Meningkatnya kualitas penanganan ATS														
IKSK.4.2129.4.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi		%	0.01	0.05	0.1	0.15	0.17	0.2						
2128-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam										1.803	1.983	2.181	2.399	2.639	Bidang PAKIS
SK.4.2128.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama														
IKSK.4.2128.1.1	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Qur'an		%	2	3	3.5	4	4.5	5						
SK.4.2128.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.4.2128.2.1	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	20	25	30	35	40						
IKSK.4.2128.2.2	Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	15	20	25	30	35						
IKSK.4.2128.2.3	Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	NA	15	20	25	30	35						
IKSK.4.2128.2.4	Persentase pendidikan diniyah/muadalah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	NA	10	15	20	25	30						
SK.4.2128.3	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.4.2128.3.1	Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah		Orang	2,074	2,795	3,300	3,750	4,200	5,000						
IKSK.4.2128.3.2	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional		%	0.03	0.03	0.05	0.06	0.08	0.01						
IKSK.4.2128.3.3	Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah		%	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002						
SK.4.2128.4	Meningkatnya kualitas penanganan ATS														
IKSK.4.2128.4.1	Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren		%	25	30	35	39	40	41						
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen										2.28	2.508	2.758	3.034	3.338	Bimbingan Masyarakat Kristen
5100-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen										105	115	127	139	153	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK.1.5100.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan														Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen
IKSK.1.5100.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	1	1	1	1	1	1						
2137-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen										255	280	308	339	373	Seksi Kelembagaan & SI, dan Seksi Penyuluhan & Budaya Keagamaan
SK.2.2137.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen														Seksi Penyuluhan & Budaya Keagamaan
IKSK.2.2137.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	100	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2137.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2137.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	850	850	850	850	850	850						
SK.2.2137.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Kristen														Seksi Kelembagaan & Sistem Infomasi

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2137.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen		%	35	35	35	35	35	35						
IKSK.2.2137.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan		Lokasi	39	0	39	39	39	39						
SK.2.2137.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.2.2137.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.2.2137.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.2.2137.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.2.2137.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	2,00	2,00	5,00	6,00	8,00	9,00						
SK.2.2137.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.2.2137.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	3	3	3	3	3	3						
SK.2.2137.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2137.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	0	0	0	50	50	50						
IKSK.2.2137.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	0	200	0	200	200	200						
IKSK.2.2137.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00						
SK.2.2137.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen														
IKSK.2.2137.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Kristen yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	5	5	5	5	5	5						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
4434-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen										62	163	214	264	325	Seksi PAK PAUD & Pendidikan Dasar, PAK Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Keagamaan Kristen
SK.3.4434.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.3.4434.1.1	Persentase siswa di SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10						
IKSK.3.4434.1.2	Persentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	20	20	20	20	20	20						
IKSK.3.4434.1.3	Persentase pengawas SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	30	30	30	30	30	30						
IKSK.3.4434.1.4	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	10	10	10	10	10	10						
IKSK.3.4434.1.5	Persentase siswa beragama Kristen di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama		%	70	71	72	73	74	75						
IKSK.3.4434.1.6	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	21	21	21	21	21	21						
IKSK.3.4434.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10						
SK.3.4434.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.3.4434.2.1	Persentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.3.4434.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.3.4434.3.1	Persentase SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK.3.4434.6	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal															
IKSK.3.4434.6.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
IKSK.3.4434.6.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
SK.3.4434.7	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.3.4434.7.1	Persentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang mengikuti PPG		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00							
IKSK.3.4434.7.2	Persentase guru pendidikan agama Kristen yang mengikuti PPG		%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00							
SK.3.4434.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan															
IKSK.3.4434.9.1	Persentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00							
SK.3.4434.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.3.4434.10.1	Persentase SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00							
IKSK.3.4434.10.2	Persentase SMPTK/ SMTK/SMAK yang Ramah Anak		%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00							
SK.3.4434.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan															
IKSK.3.4434.11.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	7	7	7	7	7	7							
IKSK.3.4434.11.2	Jumlah gugus pramuka pada SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang dibina		Unit	7	7	7	7	7	7							
2136-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen											931					Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen
SK.4.2136.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.4.2136.1.1	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5	5	5			5							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.4.2136.1.2	Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5	5	5			5							
IKSK.4.2136.1.3	Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5	5	5			5							
IKSK.4.2136.1.4	Persentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	5	5	5			5							
SK.4.2136.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.4.2136.2.1	Jumlah siswa SDTK penerima BOS		Orang	81	81	79			90							
IKSK.4.2136.2.2	Jumlah siswa SMPTK penerima BOS		Orang	35	35	45			45							
IKSK.4.2136.2.3	Jumlah siswa SMTK/ SMAK penerima BOS		Orang	151	151	174			174							
IKSK.4.2136.2.4	Persentase siswa SDTK penerima PIP		%	39	39	71			90							
IKSK.4.2136.2.5	Persentase siswa SMPTK penerima PIP		%	35	35	45			45							
IKSK.4.2136.2.6	Persentase siswa SMTK/ SMAK penerima PIP		%	151	151	174			174							
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik										436	479	527	580	638	Pembimbing Masyarakat Katolik	
SK.1.5102.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.1.5102.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	3	3	3	3	3	3							
IKSK.1.5102.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	50	50	50	50	50	50							
IKSK.1.5102.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	50	50	50	50	50	50							
IKSK.1.5102.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	1	1	1	1	1	1							
2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik										450	495	544	598	658	Pembimbing Masyarakat Katolik	
SK.2.2140.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik															
IKSK.2.2140.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	100	100	100	100	100	100							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2140.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2140.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	0	0	0	0	0	0						
IKSK.2.2140.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	50	50	50	50	50	50						
SK.2.2140.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Katolik														
IKSK.2.2140.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Katolik		%	15,00	15,00	35,00	50,00	75,00	100,00						
IKSK.2.2140.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Katolik yang diselenggarakan		Kegiatan	19	19	19	19	19	19						
SK.2.2140.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.2.2140.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.2.2140.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.2.2140.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2140.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	15	30	50	70	85	100,00						
SK.2.2140.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.2.2140.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2140.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.2.2140.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparani, dll)		Kegiatan	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2140.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.2.2140.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	2	2	2	2	2	2						
SK.2.2140.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2140.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	NA	NA	38	38	38	38						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2140.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	100	100	150	170	200	200						
IKSK.2.2140.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	15	15	35	55	70	100						
SK.2.2140.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.2.2140.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia		Pasangan	50	50	50	50	50	50						
SK.2.2140.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan katolik														
IKSK.2.2140.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	0	0	0	0	0	0						
4435-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik										30	40	55	70	75	Pembimbing Masyarakat Katolik
SK.3.4435.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.3.4435.1.1	Persentase siswa SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	0	10	10	10	10	10						
IKSK.3.4435.1.2	Persentase guru SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	0	20	20	20	20	20						
IKSK.3.4435.1.3	Persentase pengawas SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	0	0	15	15	15	15						
IKSK.3.4435.1.4	Persentase guru pendidikan agama Katolik yang dibina dalam moderasi beragama		%	25	25	50	75	85	100						
IKSK.3.4435.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama Katolik yang dibina dalam moderasi beragama		%	25	25	50	75	85	100						
IKSK.3.4435.1.6	Persentase siswa beragama Katolik di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama		%	10	20	25	30	35	40						
IKSK.3.4435.1.7	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	0	0	0	0	0	0						
SK.3.4435.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.3.4435.2.1	Persentase SMAK yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	0	0	0	0	0	0						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3.4435.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.3.4435.3.1	Persentase SMAK yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	0	0	0	0	0	0						
SK.3.4435.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.3.4435.4.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	0	0	0	0	0	0						
SK.3.4435.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.3.4435.5.1	Persentase SMAK yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.3.4435.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	0	0	0	0	0	0						
SK.3.4435.6	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal														
IKSK.3.4435.6.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
IKSK.3.4435.6.2	Persentase tenaga kependidikan lainya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00						
SK.3.4435.7	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan														
IKSK.3.4435.7.1	Persentase guru SMAK yang mengikuti PPG		%	NA	0	0	0	0	0						
IKSK.3.4435.7.2	Persentase guru Pendidikan Agama Katolik yang mengikuti PPG		%	NA	0	0	0	0	0						
IKSK.3.4435.7.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SMAK yang menerima beasiswa S2		%	NA	0	0	0	0	0						
SK.3.4435.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan														
IKSK.3.4435.8.1	Jumlah SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	0	0	0	0	0	0						
SK.3.4435.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.3.4435.9.1	Persentase SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.3.4435.9.2	Persentase siswa SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	0	0	0	0	0	0						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3.4435.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.3.4435.10.1	Persentase SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.3.4435.10.2	Persentase SMAK yang Ramah Anak		%	0	0	0	0	0	0						
SK.3.4435.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan														
IKSK.3.4435.11.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	0	0	0	0	0	0						
IKSK.3.4435.11.2	Jumlah gugus pramuka pada SMAK yang dibina		Unit	0	0	0	0	0	0						
2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik										215	237	260	286	315	Pembimbing Masyarakat Katolik
SK.4.2139.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.4.2139.1.1	Persentase Taman Seminari yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.4.2139.1.2	Persentase SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.4.2139.1.3	Persentase SMAK di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	0	0	0	0	0	0						
SK.4.2139.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.4.2139.2.1	Jumlah siswa SMAK penerima BOS		Orang	0	0	0	0	0	0						
IKSK.4.2139.2.2	Persentase siswa SMAK penerima PIP		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.4.2139.2.3	Jumlah SMAK yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	NA	NA	0	0	0	0						
SK.4.2139.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKSK.4.2139.3.1	Jumlah Taman Seminari yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	0	0	0	0	0	0						
SK.1.2144.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														
IKSK.1.2144.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	10	0	0	0	0	0						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.5103.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit												
IKSK.1.5103.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen												
2143-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu										120	132	145	160	176	Pembimbing Masyarakat Hindu
SK.2.2143.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu														
IKSK.2.2143.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai												
IKSK.2.2143.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%												
IKSK.2.2143.1.3	Jumlah peniar agama yang dibina kompetensi		Orang												
IKSK.2.2143.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok												
SK.2.2143.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Hindu														
IKSK.2.2143.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Hindu		%												
IKSK.2.2143.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Hindu yang diselenggarakan		Lokasi												
SK.2.2143.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.2.2143.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%												
SK.2.2143.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.2.2143.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%		65										
IKSK.2.2143.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%												
SK.2.2143.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.2.2143.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi												
SK.2.2143.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2143.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Dharmagita, dll)		Kegiatan		2	2	2	2	2						
SK.2.2143.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.2.2143.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen												
IKSK.2.2143.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang												
SK.2.2143.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.2.2143.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit												
SK.2.2143.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.2.2143.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)		Kegiatan		2	2	2	2	2						
SK.2.2143.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2143.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit		7	8	9	10	12						
IKSK.2.2143.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar												
IKSK.2.2143.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%												
SK.2.2143.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.2.2143.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah		Pasangan												
SK.2.2143.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana														
IKSK.2.2143.12.1	Jumlah lembaga darma dan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga												
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu															Pembimbing Masyarakat Hindu
SK.4.2142.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.4.2142.1.1	Persentase Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%												
IKSK.4.2142.1.2	Persentase Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%												
IKSK.4.2142.1.3	Persentase Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%												
IKSK.4.2142.1.4	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%												
SK.4.2142.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.4.2142.2.1	Jumlah siswa Adhi Widya Pasraman penerima BOS		Orang	14	54	54	69	84	99						
IKSK.4.2142.2.2	Jumlah siswa Madyama Widya Pasraman penerima BOS		Orang	20	69	70	85	100	115						
IKSK.4.2142.2.3	Jumlah siswa Utama Widya Pasraman penerima BOS		Orang		20	45	65	85							
IKSK.4.2142.2.4	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman penerima PIP		%	45	55	65	70	75	80						
IKSK.4.2142.2.5	Persentase siswa Madyama Widya Pasraman penerima PIP		%	53	65	78	80	85	90						
IKSK.4.2142.2.6	Persentase siswa Utama Widya Pasraman penerima PIP		%	0	55	68	70	85	90						
IKSK.4.2142.2.7	Jumlah Adhi/Madyama/ Utama Widya Pasraman yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	2	2	2	2	3	3						
SK.4.2129.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKSK.4.2129.3.1	Jumlah siswa Pratama Widya Pasraman yang tingkatkan mutunya melalui BOP			2	3	3	3	3	3						
2146-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha										0	44	48	53	58	Pembimbing Masyarakat Buddha
SK.1.2146.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2146.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.1.2146.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.1.2146.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK.1.2146.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00						
SK.1.2146.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.1.2146.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK.1.2146.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	80,00	85,00	85,00	85,00	87,00	87,00						
IKSK.1.2146.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00						
SK.1.2146.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.1.2146.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00						
IKSK.1.2146.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00						
SK.1.2146.5	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.1.2146.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00						
IKSK.1.2146.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00						
5105-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha										1.510	1.661	1.827	2.000	2.210	Pembimbing Masyarakat Buddha
SK.1.5105.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan														
IKSK.1.5105.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	5	5	5	5	5	5						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.5105.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	0	4	3	3	3	3						
IKSK.1.5105.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	5	5	5	5	5	5						
IKSK.1.5105.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	25	30	35	35	35	35						
2145-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha										491	540	594	653	719	Pembimbing Masyarakat Buddha
SK.2.2145.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha														
IKSK.2.2415.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	50	50	50	50	50	50						
IKSK.2.2415.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	45	45	45	45	45	45						
IKSK.2.2415.1.3	Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi		Orang	52	52	55	60	70	70						
IKSK.2.2415.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	25	25	25	25	25	25						
SK.2.2145.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha														
IKSK.2.2415.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha		%	55	55	60	60	65	65						
IKSK.2.2415.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan		Lokasi	2	3	5	5	5	5						
SK.2.2145.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.2.2145.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	60	65	70	75	80	80						
SK.2.2145.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.2.2145.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	40	50	60	70	80	80						
IKSK.2.2145.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	50	55	60	65	70	70						
SK.2.2145.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.2.2145.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	3	3	4	4	5	5						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2145.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.2.2145.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Sippa Dhamma Samajja, dll)		Kegiatan	2	2	2	2	2	2						
SK.2.2145.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.2.2145.7.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi		Dokumen	3	3	3	3	3	3						
IKSK.2.2145.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	13	13	13	13	13	13						
SK.2.2145.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.2.2145.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	3	3	3	3	3	3						
SK.2.2145.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.2.2145.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	4	4	4	4	4	4						
SK.2.2145.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2145.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	5	5	5	5	5	5						
IKSK.2.2145.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	25	25	25	25	25	25						
IKSK.2.2145.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	60	60	65	65	70	70						
SK.2.2145.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.2.2145.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya		Pasangan	50	50	50	50	50	50						
SK.2.2145.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha														
IKSK.2.2145.12.1	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	21	21	21	21	21	21						
4437-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha										34	58	64	71	78	Pembimbing Masyarakat Buddha

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	83,00						
SK.1.2150.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.1.2150.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	80,00	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00						
IKSK.1.2150.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	75,00	75,00	76,00	80,00	85,00	93,00						
SK.1.2150.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.1.2150.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	65	65	65	69	70	72						
IKSK.1.2150.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	89	89	90	91	92	94						
IKSK.1.2150.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	75,00	75	80	84	86	90						
SK.1.2150.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.1.2150.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	67,00	67,00	69,00	70,00	75,00	80,00						
IKSK.1.2150.4.2	Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	78,00	78,00	80,00	88,00	90,00	90,00						
SK.1.2150.5	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.1.2150.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	68,00	68,00	70,00	72,00	73,00	77,00						
IKSK.1.2150.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	70,00	70	75	76	79	81						
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri										128	140	154	170	187	Bidang PHU
SK.2.2147.1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji														
IKSK.2.2147.1.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan		%	10,00	10	16	25	35	48						
IKSK.2.2147.1.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	10	10	16	25	35	48						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK.2.2147.2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji															
IKSK.2.2147.2.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		%	13	13	16	20	25	30							
IKSK.2.2147.2.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		%	80	80	85	86	87	87.5							
2148-Pembinaan Haji										755	831	914	1.005	1.106	Bidang PHU	
SK.2.2148.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji															
IKSK.2.2148.1.1	Persentase petugas haji yang profesional		%	87	87	87	87	87	88							
IKSK.2.2148.1.2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	93,00	93	94	94.5	95	96							
IKSK.2.2148.1.3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%	65	65	65	70	80	90							
IKSK.2.2148.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara		Kegiatan	30	30	30	30	30	30							
IKSK.2.2148.1.5	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat		%	80	80	81	82	84	88							
2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu										28	33	34	35	35	Bidang PHU	
SK.2.2149.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel															
IKSK.2.2149.1.1	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji		%	90,00	90,00	90,00	92,00	93,00	95,00							
SK.2.2149.2	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu															
IKSK.2.2149.2.1	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)		%	86	86	90	96	97	99							
IKSK.2.2149.2.2	Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji		Nilai	68,00	68	70	73	75	80							

LAMPIRAN II

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 12 PROGRAM

Lampiran II
Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN										-	240	264	290	319	Subbag Kepegawaian dan Hukum
SK.1.2098.1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum														
IKSK.1.2098.1.1	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan		%	10	50	60	75	80	85						
IKSK.1.2098.1.2	Persentase produk hukum yang diterbitkan		%	10	30	40	50	75	85						
IKSK.1.2098.1.3	Persentase kasus hukum yang terselesaikan		%	10	40	50	75	85	95						
IKSK.1.2098.1.4	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan		Kegiatan	0	0	1	2	3	4						
2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian										-	673	740	814	895	Subbag Kepegawaian dan Hukum
SK.1.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)														
IKSK.1.2099.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja		%	90	90	100	100	100	100						
IKSK.1.2099.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti		%	90	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2099.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan		%	50	50	60	75	80	95						
IKSK.1.2099.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	50	60	75	80	85	90						
IKSK.1.2099.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	30	40	50	60	70	85						
IKSK.1.2099.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		%	90	95	95	95	95	95						
IKSK.1.2099.1.7	Persentase data ASN yang diupdate		%	90	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2099.1.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		%	60	70	75	80	80	90						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN									6.93	7.623	8.385	9.224	10.146	Subbag Keuangan dan BMN	
SK.1.2100.1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan														
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		Dokumen	8	8	8	8	8	8						
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	50	70	80	85	100	100						
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	97.84	98	98	98.2	98.25	98.3						
IKSK.1.2100.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama		%	75	80	80	85	85	90						
IKSK.1.2100.1.5	Persentase pencapaian dan penetapan target PNBPN dan BLU		%	100	100	100	100	100	100						
SK.1.2100.2	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel														
IKSK.1.2100.2.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	10	50	50	50	55	55						
IKSK.1.2100.2.2	Persentase tanah yang bersertifikat		%	80	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2100.2.3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN		%	100	100	100	100	100	100						
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana									-	586	645	709	780	Subbag Ortala dan KUB	
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi														
IKSK.1.2101.1.1	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi		%	50	60	65	70	75	80						
IKSK.1.2101.1.2	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan		Dokumen	NA	5	7	9	11	13						
IKSK.1.2101.1.3	Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru		%	NA	50	60	65	70	80						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2101.1.4	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis		%	NA	25	30	35	40	45						
IKSK.1.2101.1.5	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	10	15	20	30	50	75						
IKSK.1.2101.1.7	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	35	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5						
SK.1.2101.2 Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi															
IKSK.1.2101.2.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	25	25	25	30	30	35						
IKSK.1.2101.2.2	Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Satker	14	15	16	17	18	19						
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	14	28	42	56	70	84						
IKSK.1.2101.2.4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	3	10	15	20	25	50						
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan															Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
SK.1.2102.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran															
IKSK.1.2102.1.1	Persentase <i>output</i> perencanaan yang berbasis data		%	90	90	93	95	95	100						
IKSK.1.2102.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti		%	70	70	70	75	75	75						
SK.1.2102.2 Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran															
IKSK.1.2102.2.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas		%	92.26	93	94	95	96	96						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti		%	70	70	70	75	75	80						
2103-Pembinaan Administrasi Umum										2.415	2.657	2.922	3.215	3.536	Subbag Umum dan Humas
SK.1.2103.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor														
IKSK.1.2103.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	60,00	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00						
SK.1.2103.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa														
IKSK.1.2103.2.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu		%	97	98.06	99.03	100	100	100						
IKSK.1.2103.2.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik		%	55	56.41	85.79	100	100	100						
IKSK.1.2103.2.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam		%	72	74.21	83.26	100	100	100						
IKSK.1.2103.2.4	Persentase menurunnya lelang gagal		%	65	68.05	74.95	85.27	89.6	98.85						
IKSK.1.2103.2.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding		%	50	52.25	71.65	82.77	86.9	96.85						
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan										-	522	574	632	695	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
SK.1.2106.1	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi														
IKSK.1.2106.1.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		Kegiatan	100	120	130	140	145	150						
IKSK.1.2106.1.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di <i>counter</i>		%	90	90	91	93	95	100						
IKSK.1.2106.1.3	Persentase opini positif berita Kemenag		%	75	75	77.5	80	87.5	100						
SK.1.2106.2	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi														
IKSK.1.2106.2.2	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam <i>MoS (Mora one Search)</i>		Unit	0	0	1	5	10	14						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2106.2.3	Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet		Satker	0	11	36	62	82	110						
IKSK.1.2106.2.4	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan <i>reliable</i>		%	60	60	70	80	90	100						
5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama										116	995	1.095	1.204	1.325	Subbag Ortala dan KUB
SK.13.5620.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama														
IKSK.13.5620.1.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	95	95	95	95	95	95						
IKSK.13.5620.1.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	840	850	900	910	920	930						
IKSK.13.5620.1.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Lokasi	1	2	3	4	5	6						
SK.13.5620.2	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa														
IKSK.13.5620.2.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga	14	14	14	14	14	14						
IKSK.13.5620.2.2	Jumlah forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	0	14	14	14	14	14						
SK.13.5620.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)														
IKSK.13.5620.3.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		%	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
SK.13.5620.4	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya														
IKSK.13.5620.4.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya		Kegiatan	10	15	20	30	40	50						
2104-Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah										937	1.031	1.134	1.247	1.372	Bidang Bimas Islam
SK.8.2104.1	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk														
IKSK.8.2104.1.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi		Lokasi	163	163	171	180	200	205						
IKSK.8.2104.1.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana		Lokasi	15	15	40	60	64	108						
IKSK.8.2104.1.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		Orang	1.5	1.5	4	6	81	93						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.8.2104.1.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah		Orang	2.56	2.56	5.9	6.4	87	102						
IKSK.8.2104.1.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina		Orang	152	152	158	200	203	300						
IKSK.8.2104.1.6	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan		Dokumen	1	1	1	1	1	1						
SK.8.2104.2	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.8.2104.2.1	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah		Pasangan	300	300	400	500	600	650						
2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf										170	187	206	226	249	Bidang Bimas Islam
SK.8.2122.1	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat														
IKSK.8.2122.1.1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah		%	20	20	20	20	34	53						
IKSK.8.2122.1.2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi		%	1,1	1,1	1,8	2,4	2,8	4,6						
IKSK.8.2122.1.3	Persentase lembaga zakat yang dibina		%	4,02	4,02	50,3	50,3	60,00	73,03						
SK.8.2122.2	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf														
IKSK.8.2122.2.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina		%	2,01	2,01	40,5	60,5	70,00	80,00						
IKSK.8.2122.2.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan		%	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00						
IKSK.8.2122.2.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		%	3,32	3,32	5,41	8,55	15,00	17,89						
SK.8.2122.3	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat														
IKSK.8.2122.3.1	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah		%	2,00	2,00	6,00	12,00	14,00	15,00						
IKSK.8.2122.3.2	Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan		%	20,00	20,00	40,00	50,00	50,00	60,00						
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan agama Islam										235	258	284	312	344	Bidang Bimas Islam
SK.8.2123.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama														
IKSK.8.2123.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	90	90	90	90	90	90						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.8.2123.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	20,00	20,00	20,00	30,00	40,00	47,00						
IKSK.8.2123.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	14	14	14	14	14	14						
IKSK.8.2123.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	500	500	600	733	765	885						
SK.8.2123.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama														
IKSK.8.2123.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	8,00	8,00	13,00	15,00	20,00	30,00						
IKSK.8.2123.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Lokasi	1	1	1	14	14	14						
SK.8.2123.3	Persentase Penyuluh Agama yang berwawasan moderat														
IKSK.8.2123.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	80	80	90	100	100	100						
SK.8.2123.4	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.8.2123.4.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	14	14	14	14	14	14						
SK.8.2123.5	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.8.2123.5.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	1	1	1	1	1	1						
SK.8.2123.6	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.8.2123.6.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	8	8	8	8	8	8						
SK.8.2123.7	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.8.2123.7.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll)		Kegiatan	14	14	14	14	14	14						
SK.8.2123.8	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.8.2123.8.1	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00						
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah										271	298	328	360	397	Bidang Bimas Islam

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.8.2124.1	Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama														
IKSK.8.2124.1.1	Persentase konflik intra umat beragama yang ditindaklanjuti		%	1	20	20	20	20	30						
SK.8.2124.2	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.8.2124.2.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2						
IKSK.8.2124.2.2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina		Orang	100	100	100	200	200	300						
IKSK.8.2124.2.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya		Orang	28	28	28	38	40	45						
IKSK.8.2124.2.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan		Lokasi	0	0	1	1	1	1						
SK.8.2124.3	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.8.2124.3.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	0	0	0	0	0	0						
IKSK.8.2124.3.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	0	0	0	10	20	30						
SK.8.2124.4	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.8.2124.4.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	200	200	400	450	500	550						
IKSK.8.2124.4.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	2	2	2.5	5	7	10						
IKSK.8.2124.4.3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan		Kegiatan	40	40	70	90	150	200						
IKSK.8.2124.4.4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat		Lokasi	500	500	600	700	800	900						
IKSK.8.2124.4.5	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang terbina		Orang	30	30	30	40	50	50						
IKSK.8.2124.4.6	Jumlah POB yang memenuhi standar		Lokasi	0	0	1	1	1	1						
IKSK.8.2124.4.7	Jumlah lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya		Lembaga	0	0	0	0	0	1						
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam										3.544	3.899	4.288	4.717	5.189	Bidang Bimas Islam
SK.8.2125.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.8.2125.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	50,00	50,00	64	76,00	82,00	89,00						
SK.8.2125.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.8.2125.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00						
IKSK.8.2125.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00						
SK.8.2125.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.8.2125.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00	100,00						
IKSK.8.2125.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	70	70	80	90	100	100						
IKSK.8.2125.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	55	55	60	70	80	90						
SK.8.2125.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.8.2125.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	40	40	50	60	70	80						
IKSK.8.2125.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	70	70	70	80	90	100						
SK.8.2125.5 Meningkatkan ASN yang profesional															
IKSK.8.2125.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	80	80	81	85	87	90						
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam										115	126	139	153	168	Bidang PAKIS
SK.7.2127.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama															
IKSK.7.2127.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh Pendidikan Agama Islam bermuatan moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2127.1.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2127.1.3	Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2127.1.4	Persentase mahasiswa muslim di PTU, memperoleh Pendidikan Agama Islam yang bermuatan moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2127.1.5	Persentase dosen Pendidikan Agama Islam di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2127.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.7.2127.2.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2127.2.2	Persentase dosen Pendidikan Agama Islam pada PTU yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2127.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.7.2127.3.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik														
IKSK.7.2127.4.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2127.4.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2127.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan														
IKSK.7.2127.5.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Daerah Khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2127.6	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan														
IKSK.7.2127.6.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2127.6.2	Persentase pengawas Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	-	-	-	-	-	-						
2128-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam										1.803	1.983	2.181	2.399	2.639	Bidang PAKIS
SK.7.2128.1	Memuatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama														
IKSK.7.2128.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat		%	NA	0,25	0,40	0,42	0,43	0,45						
IKSK.7.2128.1.2	Persentase peningkatan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an		%	2	3	3.5	4	4.5	5						
SK.7.2128.2	Memuatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama														
IKSK.7.2128.2.1	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	0	0	0,002	0,0012	0,022						
IKSK.7.2128.2.2	Persentase dosen Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	0	0	0,005	0,006	0,008						
SK.7.2128.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.7.2128.3.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128.4	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.7.2128.4.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128.5	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.7.2128.5.1	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.5.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2128.5.3	Persentase Kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.5.4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.5.5	Persentase dosen Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	NA	0	0	0,05	0,06	0,08						
IKSK.7.2128.5.6	Persentase tenaga kependidikan Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	NA	0	0	0,05	0,06	0,08						
SK.7.2128.6	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.7.2128.6.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	-	-	-	-	-	-						
SK.5.2128.7	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.7.2128.7.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128.8	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.7.2128.8.1	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.8.2	Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.8.3	Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.8.4	Persentase Pendidikan Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.8.5	Persentase Mahad Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	-	0	0	0,01	0,05	0,07						
SK.7.2128.9	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2128.9.1	Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah		Orang	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.9.2	Persentase Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional		%	0,03	0,03	0,05	0,06	0,08	0,010						
IKSK.7.2128.9.3	Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah		%	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002						
SK.7.2128.10	Meningkatnya jumlah Anak Tidak Sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan														
IKSK.7.2128.10.1	Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128.11	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik														
IKSK.7.2128.11.1	Persentase Ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti PPG		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.11.2	Persentase Ustadz pendidikan diniyah/ muadalah berkualifikasi minimal S1		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128.12	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi														
IKSK.7.2128.12.1	Jumlah Pendidikan keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128.13	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.7.2128.13.1	Persentase lembaga pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan budaya mutu		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.13.2	Persentase santri pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.13.3	Persentase Ma'had Aly yang menerapkan budaya mutu		%	NA	0,25	0,40	0,42	0,43	0,45						
IKSK.7.2128.13.4	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	NA	0	0	0	0,0001	0,0002						
SK.7.2128.14	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.7.2128.14.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2128.14.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128.15 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan															
IKSK.7.2128.15.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2128.15.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina		Unit	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128.16 Meningkatkan kualitas pendidik vokasi															
IKSK.7.2128.16.1	Jumlah Guru/Instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		Orang	NA	2	4	6	7	9						
SK.7.2128.17 Meningkatkan kualitas lulusan Ma'had Aly															
IKSK.7.2128.17.1	Persentase lulusan Ma'had Aly yang tepat waktu		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.7.2128.17.2	Rerata lama masa studi mahasiswa Ma'had Aly		Tahun	0	0	0	4	4	4						
2129-Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah										20.207	22.228	24.45	26.895	29.585	Bidang Pendidikan Madrasah
SK.7.2129.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.7.2129.1.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	NA	20	30	35	42	50						
IKSK.7.2129.1.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	1,000	2,000	4,000	5,000	6,000	7,000						
SK.7.2129.2 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir															
IKSK.7.2129.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	50	60	62	70	73	80						
SK.7.2129.3 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif															

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2129.3.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	40	45	60	65	90	95						
SK.7.2129.4 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan															
IKSK.7.2129.4.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	NA	100	100	100	100	100						
SK.7.2129.5 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran															
IKSK.7.2129.5.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	2	3	5	10	15	30						
IKSK.7.2129.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	3	5	9	10	15	30						
SK.7.2129.6 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.7.2129.6.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	68	69	70	71	72	73						
IKSK.7.2129.6.2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	70	72	75	78	80	82						
IKSK.7.2129.6.3	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	78	80	81	82	84	85						
IKSK.7.2129.6.4	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	79	80	83	85	87	89						
IKSK.7.2129.6.5	Persentase Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	55	60	61	62	63	65						
SK.7.2129.7 Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.7.2129.7.1	Jumlah siswa MI penerima BOS		Orang	24079	24079	25283	26547	27874	29268						
IKSK.7.2129.7.2	Jumlah siswa MTs penerima BOS		Orang	38269	38269	40182	42192	44301	46516						
IKSK.7.2129.7.3	Jumlah siswa MA penerima BOS		Orang	19772	19772	20761	21799	22889	24033						
IKSK.7.2129.7.4	Persentase siswa MI penerima PIP		%	22	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5						
IKSK.7.2129.7.5	Persentase siswa MTs penerima PIP		%	25	24	24	24	24	24						
IKSK.7.2129.7.6	Persentase siswa MA penerima PIP		%	21	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2129.7.7	Jumlah Madrasah yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129.8	Meningkatnya jumlah Anak Tidak Sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan														
IKSK.7.2129.8.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129.9	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKSK.7.2129.9.1	Jumlah Siswa RA yang tingkatan mutunya melalui BOP		Orang	4355	4355	4573	4801	5041	5294						
SK.7.2129.10	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi														
IKSK.7.2129.10.1	Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129.11	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.7.2129.11.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2129.11.2	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129.12	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan														
IKSK.7.2129.12.1	Persentase Madrasah yang mendapatkan Pelatihan Sistem e-RKAM		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129.13	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.7.2129.13.1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2129.13.2	Persentase Madrasah Ramah Anak		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129.14	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan														
IKSK.7.2129.14.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2129.14.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina		Unit	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129.15	Menguatnya reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2129.15.1	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang		%	-	-	-	-	-	-						
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah										62	69				Bidang Pendidikan Madrasah
SK.7.2133.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.7.2133.1.1	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2133.1.2	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2133.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.7.2133.2.1	Persentase Guru pada Madrasah yang lulus sertifikasi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2133.2.2	Persentase tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2133.2.3	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2133.2.4	Persentase Guru Madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/ MGMP Pola PKB dan AKG		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2133.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.7.2133.3.1	Persentase guru Madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2133.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah		Orang	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2133.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik														
IKSK.7.2133.4.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2133.4.2	Persentase Calon Pengawas yang menerima beasiswa S2		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2133.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2133.5.1	Persentase Guru pada Madrasah Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan Khusus		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2133.5.2	Persentase Tenaga Kependidikan Madrasah Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan Khusus		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2133.6	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi														
IKSK.7.2133.6.1	Jumlah Guru MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		Orang	-	-	-	-	-	-						
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam										20.337					Bidang Pendidikan Madrasah
SK.7.2135.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														
IKSK.7.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70	73	75	78	80	81						
SK.7.2135.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.7.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.7.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2135.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.7.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.2135.4.2	Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	88	90	91	92	93	95						
SK.7.2135.5	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.7.2135.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.2135.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	-	-	-	-	-	-						
2136-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen										847	931	1.024	1.127	1.240	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK.9.2136.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.9.2136.1.1	Persentase siswa di SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.2136.1.2	Persentase guru SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	20	20	20	20	20	20						
IKSK.9.2136.1.4	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.2136.1.5	Persentase siswa beragama Kristen di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama		%	70	71	72	73	74	75						
IKSK.9.2136.1.6	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	21	21	21	21	21	21						
IKSK.9.2136.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10						
SK.9.2136.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.9.2136.2.1	Persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.9.2136.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.2136.3.1	Persentase SDTK/ SMPTK/SMTK/ SMAK yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
SK.9.2136.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.9.2136.5.1	Persentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5						
IKSK.9.2136.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5						
SK.9.2136.6	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.9.2136.6.1	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.2136.6.2	Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.2136.6.3	Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	10	10	10	10	10	10						
SK.9.2136.7	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.9.2136.7.1	Jumlah siswa SDTK penerima BOS		Orang	81	81	79	90	90	90						
IKSK.9.2136.7.2	Jumlah siswa SMPTK penerima BOS		Orang	35	35	45	45	45	45						
IKSK.9.2136.7.3	Jumlah siswa SMTK/ SMAK penerima BOS		Orang	151	151	174	174	174	174						
IKSK.9.2136.7.4	Persentase siswa SDTK penerima PIP		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.9.2136.7.5	Persentase siswa SMPTK penerima PIP		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.9.2136.7.6	Persentase siswa SMTK/ SMAK penerima PIP		%	100	100	100	100	100	100						
SK.9.2136.8	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal														
IKSK.9.2136.8.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50	50	50	50	50						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.2136.8.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50	50	50	50	50						
SK.9.2136.9 Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.9.2136.9.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Kristen yang mengikuti PPG		%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
SK.9.2136.12 Meningkatkan jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter															
IKSK.9.2136.12.1	Persentase SMPTK/ SMTK/SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter		%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5						
SK.9.2136.13 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.9.2136.13.1	Persentase SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	25	25	25	25	25	25						
IKSK.9.2136.13.2	Persentase SMPTK/ SMTK/SMAK Ramah Anak		%	50	50	50	50	50	50						
SK.9.2136.14 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan															
IKSK.9.2136.14.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	7	7	7	7	7	7						
IKSK.9.2136.14.2	Jumlah gugus pramuka pada SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang dibina		Unit	7	7	7	7	7	7						
2137-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen										255	280	308	339	373	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK.9.2137.1 Meningkatkan kualitas penyuluhan agama Kristen															
IKSK.9.2137.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.9.2137.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.9.2137.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	40	40	40	40	40	40						
IKSK.9.2137.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	26.829	26.829	26.844	26.894	26.899	26.904						
SK.9.2137.2 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Kristen															

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.2137.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
IKSK.9.2137.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan		Lokasi	34	34	34	34	34	34						
SK.9.2137.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.9.2137.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.9.2137.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.9.2137.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.9.2137.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	2,00	2,00	5,00	6,00	8,00	9,00						
SK.9.2137.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.9.2137.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1						
SK.9.2137.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.9.2137.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, dll)		Kegiatan	35	35	35	35	35	35						
SK.9.2137.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.9.2137.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.2137.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	50	50	50	50	50	50						
SK.9.2137.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.9.2137.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	5	5	5	5	5	5						
SK.9.2137.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.9.2137.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	35	35	35	35	35	35						
SK.9.2137.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.9.2137.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	1	1	1	1	1	1							
IKSK.9.2137.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	50	50	50	50	50	50							
IKSK.9.2137.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00							
SK.9.2137.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.9.2137.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani		Pasangan	35	35	35	35	35	35							
SK.9.2137.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan kristen															
IKSK.9.2137.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan kristen yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	5	5	5	5	5	5							
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen										2.28	2.508	2.758	3.034	3.338	Bimbingan Masyarakat Kristen	
SK.9.2138.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.9.2138.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
SK.9.2138.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.9.2138.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSK.9.2138.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
SK.9.2138.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.9.2138.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00							
IKSK.9.2138.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00							
IKSK.9.2138.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK.9.2138.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.9.2138.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	30	30	40	50	60	70							
IKSK.9.2138.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50	50	50	50	50	50							
SK.9.2138.5	Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.9.2138.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	80	80	80	80	80	80							
IKSK.9.2138.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	80	80	80	80	80	80							
2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik										215	237	260	286	315	Pembimbing Masyarakat Katolik	
SK.10.2139.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.10.2139.1.1	Persentase siswa SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10							
IKSK.10.2139.1.2	Persentase guru SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	20	20	20	20	20	20							
IKSK.10.2139.1.3	Persentase pengawas SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10							
IKSK.10.2139.1.4	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	25	25	50	75	85	100							
IKSK.10.2139.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	25	25	50	75	85	100							
IKSK.10.2139.1.6	Persentase siswa beragama Katolik di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama		%	10	20	25	30	35	40							
IKSK.10.2139.1.7	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	0	0	0	0	0	0							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2139.8.1	Persentase Guru SMAK yang mengikuti PPG		%	NA	NA	0	0	0	0						
IKSK.10.2139.8.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Katolik yang mengikuti PPG		%	NA	NA	15	30	30	30						
IKSK.10.2139.8.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SMAK yang menerima beasiswa S2		%	NA	NA	0	0	0	0						
SK.10.2139.9	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan														
IKSK.10.2139.9.1	Jumlah SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	0	0	0	0	0	0						
SK.10.2139.10	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.10.2139.10.1	Persentase kepala SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.2139.10.2	Persentase siswa SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	0	0	0	0	0	0						
SK.10.2139.11	Meningkatnya jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter														
IKSK.10.2139.11.1	Persentase SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter		%	0	0	0	0	0	0						
SK.10.2139.12	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.10.2139.12.1	Persentase SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.2139.12.2	Persentase SMAK Ramah Anak		%	0	0	0	0	0	0						
SK.10.2139.13	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan														
IKSK.10.2139.13.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.2139.13.2	Jumlah gugus pramuka pada SMAK yang dibina		Unit	0	0	0	0	0	0						
2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik										450	495	544	598	658	Pembimbing Masyarakat Katolik
SK.10.2140.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik														
IKSK.10.2140.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	100	100	100	100	100	100						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2140.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2140.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.2140.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	50	50	50	50	50	50						
SK.10.2140.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Katolik														
IKSK.10.2140.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Katolik		%	15	15	35	50	75	100						
IKSK.10.2140.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Katolik yang diselenggarakan		Kegiatan	19	19	19	19	19	19						
SK.10.2140.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.10.2140.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2140.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.10.2140.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	5,00	4,77	35,00	55,00	75,00	100,00						
IKSK.10.2140.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	NA	NA	5	5	8	9						
SK.10.2140.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.10.2140.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1						
SK.10.2140.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.10.2140.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparani, dll)		Kegiatan	1	1	1	1	1	1						
SK.10.2140.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKK.10.2140.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA	NA	8	15	25	38						
IKK.10.2140.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA	NA	24	45	75	114						
SK.10.2140.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2140.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	NA	8	15	25	38						
SK.10.2140.9 Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi															
IKSK.10.2140.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	2	2	2	2	2	2						
SK.10.2140.10 Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															
IKSK.10.2140.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	NA	NA	38	38	38	38						
IKSK.10.2140.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	10	5	20	20	20	20						
IKSK.10.2140.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	15,00	15,00	35,00	55,00	70,00	100,00						
SK.10.2140.11 Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.10.2140.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia		Pasangan	3	805	3.387	4.808	4	7						
SK.10.2140.12 Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan katolik															
IKSK.10.2140.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	1	1	1	1	1	1						
2141-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik										600	660	726	799	879	Pembimbing Masyarakat Katolik
SK.10.2141.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.10.2141.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2141.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.10.2141.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.2141.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2141.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.10.2141.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.10.2141.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.10.2141.5 Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.10.2141.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
IKSK.10.2141.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	75	80	85	90	95	100						
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik										436	479	527	580	638	Pembimbing Masyarakat Katolik
SK.10.5102.1 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.10.5102.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	3	3	3	3	3	3						
IKSK.10.5102.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	50	50	50	50	50	50						
IKSK.10.5102.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	50	50	50	50	50	50						
IKSK.10.5102.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	0	0	0	0	0	0						
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu										1.542	1.697	1.866	2.053	2.259	Pembimbing Masyarakat Hindu
SK.11.2142.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.2142.1.1	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%												
IKSK.11.2142.1.2	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama		%												
IKSK.11.2142.1.3	Persentase pengawas Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dibina dalam moderasi beragama		%												
IKSK.11.2142.1.4	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%												
IKSK.11.2142.1.5	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%												
IKSK.11.2142.1.6	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan												
IKSK.11.2142.1.7	Persentase siswa beragama Hindu di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%												
SK.11.2142.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir														
IKSK.11.2142.2.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%												
SK.11.2142.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif														
IKSK.11.2142.3.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	NA											
SK.11.2142.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.2142.4.1	Persentase guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	NA											
IKSK.11.2142.4.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman		Orang	NA	NA										
IKSK.11.2142.4.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa		Kegiatan	NA	NA										
IKSK.11.2142.4.4	Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		Orang	NA	NA										
SK.11.2142.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.11.2142.5.1	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	NA										
IKSK.11.2142.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	NA										
SK.11.2142.6	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.11.2142.6.1	Persentase Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%												
IKSK.11.2142.6.2	Persentase Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%												
IKSK.11.2142.6.3	Persentase Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%												
IKSK.11.2142.6.4	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%												
SK.11.2142.7	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.11.2142.7.1	Jumlah siswa Adhi Widya Pasraman penerima BOS		Orang	14	54	54	69	84	99						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.2142.7.2	Jumlah siswa Madyama Widya Pasraman penerima BOS		Orang	20	69	70	85	100	115						
IKSK.11.2142.7.3	Jumlah siswa Utama Widya Pasraman penerima BOS		Orang			20	45	65	85						
IKSK.11.2142.7.4	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman penerima PIP		%	45	55	65	70	75	80						
IKSK.11.2142.7.5	Persentase siswa Madyama Widya Pasraman penerima PIP		%	53	65	78	80	85	90						
IKSK.11.2142.7.6	Persentase siswa Utama Widya Pasraman penerima PIP		%	0	55	68	70	85	90						
IKSK.11.2142.7.7	Jumlah Adhi/Madyama/ Utama Widya Pasraman yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga												
SK.11.2142.8	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKSK.11.2142.8.1	Jumlah siswa Pratama Widya Pasraman yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Orang												
SK.11.2142.9	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal														
IKSK.11.2142.9.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%												
IKSK.11.2142.9.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%												
SK.11.2142.10	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan														
IKSK.11.2142.10.1	Persentase Guru Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang mengikuti PPG		%												
IKSK.11.2142.10.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Hindu yang mengikuti PPG		%	65	75	80	85	90	95						
IKSK.11.2142.10.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerima beasiswa S2		%												
SK.11.2142.11	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.2142.15.	Jumlah gugus pramuka pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasramann yang dibina		Unit												
2143-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu										1.48	1.628	1.79	1.969	2.166	Pembimbing Masyarakat Hindu
SK.11.2143.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu														
IKSK.11.2143.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai												
IKSK.11.2143.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	60	67	75	80	85	95						
IKSK.11.2143.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	1	2	4	6	8	10						
IKSK.11.2143.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	2	4	6	8	10	12						
SK.11.2143.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Hindu														
IKSK.11.2143.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Hindu		%												
IKSK.11.2143.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Hindu yang diselenggarakan		Lokasi												
SK.11.2143.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.11.2143.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%												
SK.11.2143.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.11.2143.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	73	75	79	80	82	85						
IKSK.11.2143.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	7	8	10	12	14	16						
SK.11.2143.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														
IKSK.11.2143.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi												
SK.11.2143.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.2144.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	53	55	59	61	63	65						
SK.11.2144.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.11.2144.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%												
IKSK.11.2144.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%												
SK.11.2144.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.11.2144.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	1	1	1	1	1	1						
IKSK.11.2144.3.3	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%												
IKSK.11.2144.3.4	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%												
SK.11.2144.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern															
IKSK.11.2144.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%												
IKSK.11.2144.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%												
SK.11.2144.5 Meningkatkan ASN yang profesional															
IKSK.11.2144.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	1	1	1	1	1	1						
IKSK.11.2144.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	1	1	1	1	1	1						
5103-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu										120	132	145	160	176	Pembimbing Masyarakat Hindu
SK.11.5103.1 Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.11.5103.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	1	2	2	2	2	2						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.11.5103.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	1	2	2	2	2	2						
IKSK.11.5103.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	1	2	4	6	8	10						
IKSK.11.5103.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen												
IKSK.11.5103.1.5	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional		Orang	48	50	51	53	55	59						
2145-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha										491	540	594	653	719	Pembimbing Masyarakat Buddha
SK.12.2145.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha														
IKSK.12.2415.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	70	75	76	77	78	79						
IKSK.12.2415.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	60	65	70	75	80	85						
IKSK.12.2415.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	50	50	60	70	75	80						
IKSK.12.2415.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	8	8	8	8	8	8						
SK.12.2145.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha														
IKSK.12.2415.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha		%	35	35	35	40	40	40						
IKSK.12.2415.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan		Lokasi	4	4	4	4	4	4						
SK.12.2145.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.12.2145.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00						
SK.12.2145.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.12.2145.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	40	50	60	70	80	90						
IKSK.12.2145.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	60	60	70	70	70	70						
SK.12.2145.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.12.2145.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	5	5	5	5	5	5						
SK.12.2145.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.12.2145.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Swayamwara Tripitaka Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja dll)		Kegiatan	2	2	2	2	2	2						
SK.12.2145.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.12.2145.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi		Dokumen	3	3	3	3	3	3						
IKSK.12.2145.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	21	21	21	21	21	21						
SK.12.2145.7	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.12.2145.7.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	5	5	5	5	5	5						
SK.12.2145.8	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.12.2145.8.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	5	5	5	5	5	5						
SK.12.2145.9	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.12.2145.9.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	5	5	5	5	5	5						
IKSK.12.2145.9.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	25	25	25	25	25	25						
IKSK.12.2145.9.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	65	65	65	65	65	65						
SK.12.2145.10	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.12.2145.10.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya		Pasangan	50	50	50	50	50	50						
SK.12.2145.11	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha														
IKSK.12.2145.11.1	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	21	21	21	21	21	21						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2146-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha									-	44	48	53	58	Pembimbing Masyarakat Buddha	
SK.12.2146.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														
IKSK.12.2146.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	100	100	100	100	100	100						
SK.12.2146.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.12.2146.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00						
IKSK.12.2146.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
SK.12.2146.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.12.2146.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.12.2146.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	100	90	90	100	100	100						
IKSK.12.2146.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	100	100	100	100	100	100						
SK.12.2146.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.12.2146.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00	80,00						
IKSK.12.2146.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00	80,00						
SK.12.2146.5	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.12.2146.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.12.2146.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	70	75	80	85	90	95						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
4012-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha									941	1.035	1.139	1.253	1.378	Pembimbing Masyarakat Buddha	
SK.11.4012.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.11.4012.1.1	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	55	60	70	80	90	95						
IKSK.11.4012.1.2	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	55	60	70	80	90	95						
IKSK.11.4012.1.3	Persentase siswa beragama Buddha di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Buddha yang bermuatan moderasi beragama		%	55	60	70	80	90	95						
SK.12.4012.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.12.4012.2.1	Persentase Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	50	50	50	50	50	50						
IKSK.12.4012.2.2	Persentase Nava Dhammasekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	50	55	60	65	70	75						
IKSK.12.4012.2.3	Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	50	55	60	65	70	75						
SK.12.4012.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKSK.12.4012.3.1	Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	2	2	2	2	2	2						
SK.12.4012.4	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal														
IKSK.12.4012.4.1	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	55	60	65	70	75	80						
IKSK.12.4012.4.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	55	60	65	70	75	80						
SK.12.4012.5	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan														
IKSK.12.4012.5.1	Persentase Guru Pendidikan Agama Buddha yang mengikuti PPG		%	20	20	20	20	20	20						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5105-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha									1.51	1.661	1.827	2.009	2.21	Pembimbing Masyarakat Buddha	
SK.12.5105.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan														
IKSK.12.5105.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	5	5	5	5	5	5						
IKSK.12.5105.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	3	3	3	3	3	3						
IKSK.12.5105.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	5	5	5	5	5	5						
IKSK.12.5105.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	35	40	45	50	55	60						
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri									128	140	154	170	187	Bidang PHU	
SK.6.2147.1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji														
IKSK.6.2147.1.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan		%	10	10	16	25	35	48						
IKSK.6.2147.1.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	10	10	16	25	35	48						
SK.6.2147.2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji														
IKSK.6.2147.2.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		%	13	13	16	20	25	30						
IKSK.6.2147.2.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		%	80	80	85	86	87	87.5						
2148-Pembinaan Haji									755	831	914	1.005	1.106	Bidang PHU	
SK.6.2148.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji														
IKSK.6.2148.1.1	Persentase petugas haji yang profesional		%	87	87	87	87	87	88						
IKSK.6.2148.1.2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	93	93	94	94.5	95	96						
IKSK.6.2148.1.3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%	65	65	65	70	80	90						
IKSK.6.2148.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara		Kegiatan	30	30	30	30	30	30						
IKSK.6.2148.1.5	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat		%	80	80	81	82	84	88						
2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu									-	33	34	35	35	Bidang PHU	

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BO..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.6.2149.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel														
IKSK.6.2149.1.1	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji		%	90	90	90	92	93	95						
SK.6.2149.2	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu														
IKSK.6.2149.2.1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)		%	86	86	90	96	97	99						
IKSK.6.2149.2.2	Tingkat kepuasan pengakses layanan <i>website</i> haji		Nilai	68	68	70	73	75	80						
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah										3.25	3.575	3.933	4.326	4.759	Bidang PHU
SK.6.2150.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														
IKSK.6.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	50	50	60	70	80	83						
SK.6.2150.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.6.2150.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	80,00	80	83	85	87	90						
IKSK.6.2150.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	75	75	76	80	85	93						
SK.6.2150.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.6.2150.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	65	65	65	69	70	72						
IKSK.6.2150.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	89	89	90	91	92	94						
IKSK.6.2150.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	75,00	75	80	84	86	90						
SK.6.2150.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.6.2150.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	67,00	67	69	70	75	80						
IKSK.6.2150.4.2	Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	78	78	80	88	90	90						
SK.6.2150.5	Meningkatnya ASN yang profesional														

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	B0..ASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.6.2150.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	68,00	68	70	72	73	77						
IKSK.6.2150.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	70,00	70	75	76	79	81						

LAMPIRAN III

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024**

LAMPIRAN III

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024 (KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 564 TAHUN 2020 TANGGAL 21 APRIL 2020)

1. Penanggungjawab : Rusman Langke (Kepala Kantor).
2. Ketua : Kiflin (Kepala Bagian Tata Usaha).
3. Sekretaris : Arman (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi).
4. Anggota :
 - 1) Muhammad Ramli (Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam);
 - 2) Gasim Yamani (Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dan Plt. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah);
 - 3) Lutfi Yunus (Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah);
 - 4) Kaleb Toki'i (Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen);
 - 5) Matius Panti (Pembimbing Masyarakat Katolik);
 - 6) I Wayan Tantra (Pembimbing Masyarakat Hindu);
 - 7) Warsana (Pembimbing Masyarakat Buddha);
 - 8) Ikwan A. Sahi (Perencana Muda);
 - 9) Didit Perkasa Adiwinata (Perencana Pertama);
 - 10) Desty Kusumawati (Penyusun Rencana Program dan Anggaran);
 - 11) Firdaus (Calon Statistisi Ahli Pertama);
 - 12) Civia (Pengolah Data).